



Menyambut Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Tahun 2024

(Perpres No. 39/2023)

Survei Kesiapan Manajemen Risiko Sektor Publik



Menyambut Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Tahun 2024

(Perpres No. 39/2023)

Survei Kesiapan Manajemen Risiko Sektor Publik

Sekilas IRMAPA

IRMAPA, atau Indonesia Risk Management Professional Association, adalah sebuah asosiasi bagi para profesional bidang manajemen risiko lintas sektor dan industri di Indonesia yang didirikan pada tanggal 30 April 2012. Para Anggota yang tergabung dalam organisasi ini berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari para praktisi korporasi, baik BUMN, swasta nasional, maupun PMA, baik perusahaan terbuka maupun private company, termasuk di dalamnya pejabat pemerintah pusat dan daerah, konsultan, periset, dosen, hingga mahasiswa.

IRMAPA memiliki visi untuk menjadi asosiasi profesi manajemen risiko di Indonesia yang menduduki posisi terhormat di dalam dan luar negeri, serta memiliki tujuan untuk:

IRMAPA memiliki visi untuk menjadi asosiasi profesi manajemen risiko di Indonesia yang menduduki posisi terhormat di dalam dan luar negeri. IRMAPA memiliki tujuan untuk

1. Menyediakan program dan layanan bernilai tambah bagi anggota dan pemangku kepentingannya;
2. Memperkuat kredibilitas organisasi dengan dasar tata kelola organisasi yang baik; dan
3. Meningkatkan harkat dan martabat profesi manajemen risiko di Indonesia melalui kontribusi positif kepada masyarakat.

Dalam menuju visi dan pencapaian tujuannya, IRMAPA senantiasa aktif menghubungkan para pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan dan inisiatif agar tercipta kolaborasi sinergis antara IRMAPA dengan pemangku kepentingannya, serta juga antar pemangku kepentingan, sehingga melalui kolaborasi sinergis ini IRMAPA dan para pemangku kepentingan dapat menyediakan apa yang dibutuhkan oleh praktisi manajemen risiko di tempatnya. Dengan demikian diharapkan bahwa kegiatan dan inisiatif IRMAPA dapat menjadi langkah IRMAPA dalam berkontribusi secara kolektif bersama para pemangku kepentingannya terhadap pengembangan penerapan dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di Indonesia.

Hingga saat ini, IRMAPA terus berbenah dan mengembangkan kapasitas diri untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh Anggota. IRMAPA juga bertekad untuk terus mendukung praktisi di bidang manajemen risiko di Indonesia, baik dengan menjadi pusat informasi dan updates seputar manajemen risiko hingga menyediakan kesempatan yang lebih luas untuk berkontribusi bagi negeri, karena IRMAPA meyakini bahwa kiprah para Anggota dalam mendukung penerapan manajemen risiko di organisasi masing-masing yang pada akhirnya akan meningkatkan pengakuan dan apresiasi terhadap profesi manajemen risiko di Indonesia.

Irmapa.org

Daftar Isi

Tentang IRMAPA	2
Daftar Isi	3
Prolog	4
Hasil Survei IRMAPA: Sektor Publik 2023	
BAB 1. Profil Responden	5
BAB 2. Pengukuran Manajemen Risiko Indeks (MRI)	12
BAB 3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	38
Kesimpulan	56
Epilog	57
Profil Organisasi	
IRMAPA	58
The Way Academy	59



PROLOG



Merespons Perpres No. 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), sekaligus menjadi wujud komitmen IRMAPA dalam mendukung penerapan dan pengembangan manajemen risiko sektor publik di Indonesia, IRMAPA menyelenggarakan surevi tahunan manajemen risiko untuk konteks sektor publik di Indonesia, kali ini dengan tema “Kesiapan Manajemen Risiko Sektor Publik untuk Mendukung Penerapan Perpres 39/2023 di Tahun 2024”. Pemilihan topik ini dilatarbelakangi oleh satu keyakinan IRMAPA bahwa implementasi MRPN berpotensi menghadapi risiko ketidakefektifan pelaksanaan ketika entitas MRPN yang nantinya akan menjalankannya belum memiliki atau mencapai suatu tingkat kematangan penerapan manajemen risiko yang memadai.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa terdapat satu target dalam RPJMN 2019-2024, yaitu tingkat maturitas penerapan manajemen risiko sektor publik, atau lebih dikenal dengan Manajemen Risiko Indeks (MRI), dapat mencapai level 3 secara proporsional dan berimbang, baik pada lembaga pemerintah pusat maupun daerah, hingga mencakup pemerintah kabupaten/kota. Pencapaian target ini akan saling berkejaran dengan implementasi MRPN di tahun 2024. Dengan latar belakang ini, IRMAPA berinisiatif menyelenggarakan survei manajemen risiko sektor publik di tahun ini untuk mendapatkan gambaran di lapangan mengenai kesiapan lembaga sektor publik untuk mendukung pelaksanaan Perpres No. 39/2023 melalui capaian MRI di level 3.

Atas nama seluruh pengurus dan tim yang telah menyelenggarakan survei ini, besar harapan kami semua bahwa hasil survei yang dilaporkan dapat bermanfaat sebagai bagian dalam bahan pertimbangan pada proses pengambilan keputusan, maupun sebagai bagian dari ragam informasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh praktisi dan profesional manajemen risiko sektor publik di Indonesia melalui analisis dan kajian lanjutan untuk menjadi informasi yang lebih bernas dan intuitif bagi perluasan capaian MRI level 3 di berbagai lembaga pemerintah pusat dan daerah sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keberhasilan dan keefektifan implementasi MRPN berbasis Perpres No. 39/2023.

Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktu dan berbagi pandangan dengan berpartisipasi dalam survei ini. Semoga apa yang kita laksanakan ini dapat membawa manfaat bagi praktik manajemen risiko di Indonesia serta masyarakat luas pada umumnya. Menyadari bahwa laporan survei ini masih jauh dari sempurna, dengan seluruh kerendahan hati, saya mewakili seluruh jajaran Pengurus IRMAPA mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun segala kritik dan saran yang bersifat dapat mengembangkan kualitas dari pelaksanaan dan hasil survei kami nantikan melalui sekretariat@irmapa.org.

Demikian sambutan ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi kita dengan segala kebaikan, semangat, dan tenaga untuk bekerja keras dan saling bahu-membahu dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 melalui praktik manajemen risiko sektor publik yang andal, proaktif, berintegritas, dan profesional.

Salam hangat,

Charles R. Vorst
Ketua.

PROFIL RESPONDEN

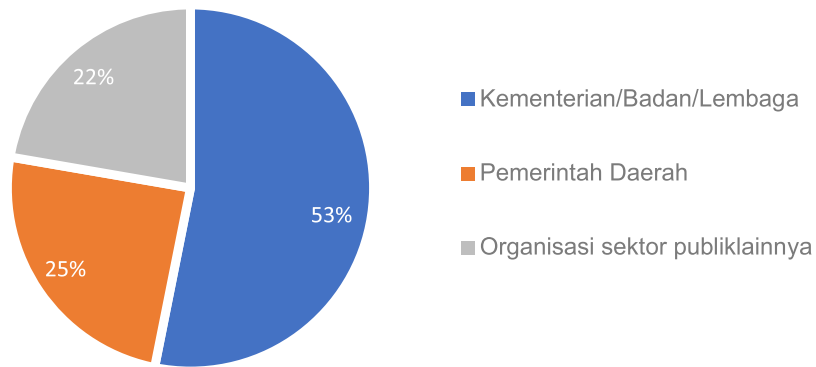


Figure 1 Jenis Organisasi

Survei ini dilakukan secara online dengan diikuti total 350 responden, yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga sebanyak 53%, Pemerintah Daerah 25% dan dari Organisasi Sektor Publik Lainnya sebanyak 22%.

Bidang Kementerian/Badan/Lembaga

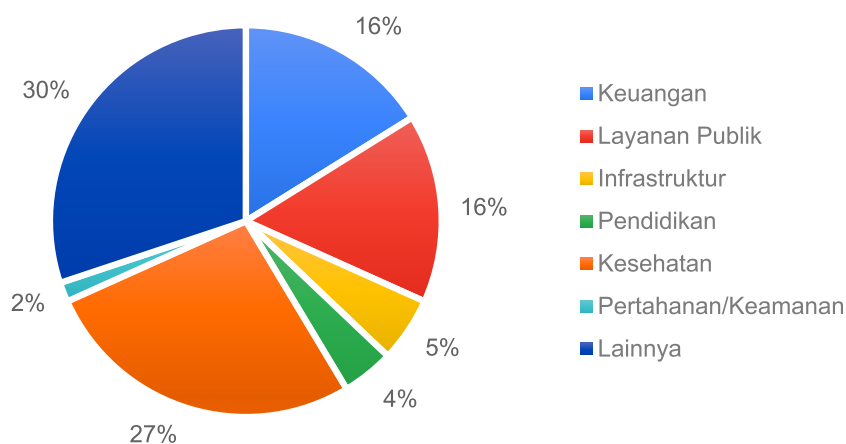


Figure 2 Bidang Organisasi Kementrian/Badan/Lembaga

Pada posisi 4 teratas berdasarkan Bidang untuk responden yang berasal dari Organisasi/Kementerian/Badan/Lembaga adalah dari bidang kesehatan, keuangan, layanan publik dan bidang lainnya.

Pemerintah Daerah

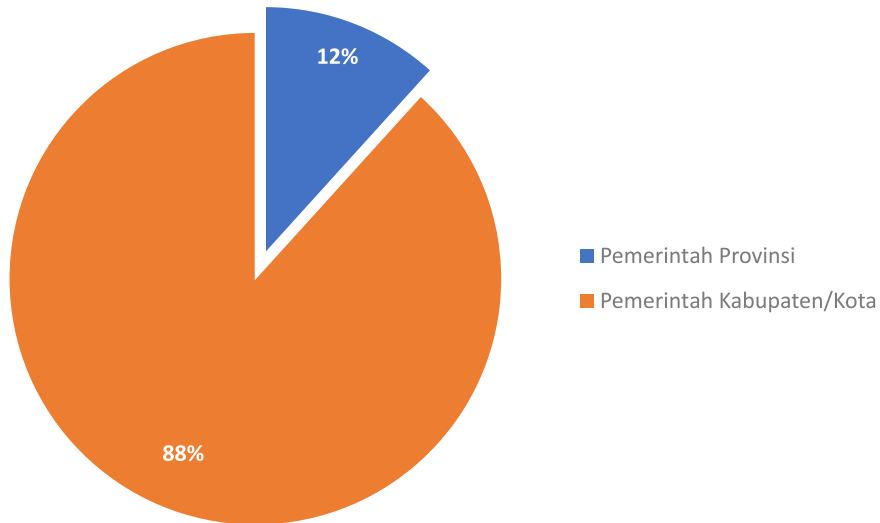


Figure 3 Pemerintah Daerah

Untuk responden survei berdasarkan Pemerintah Daerah, yang berasal dari Pemerintah Provinsi 12% dan Pemerintah Kabupaten/Kota 88%.

Bidang Organisasi Sektor Publik Lainnya

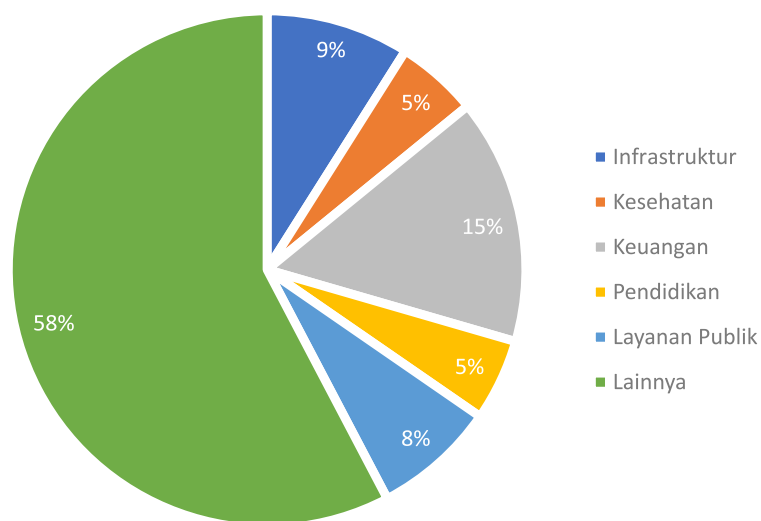


Figure 4 Bidang Organisasi Sektor Publik Lainnya

Pada posisi 4 teratas berdasarkan bidang untuk responden yang berasal dari Organisasi Sektor Publik Lainnya adalah dari bidang keuangan, infrastruktur, layanan publik dan bidang lainnya.

Jenis Kelamin

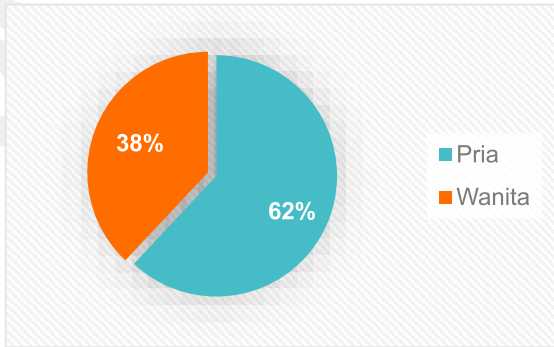


Figure 5 Semua Responden

Total responden survei sebagian besarnya adalah pria sebesar 62%, sedangkan responden wanita sebesar 38%.

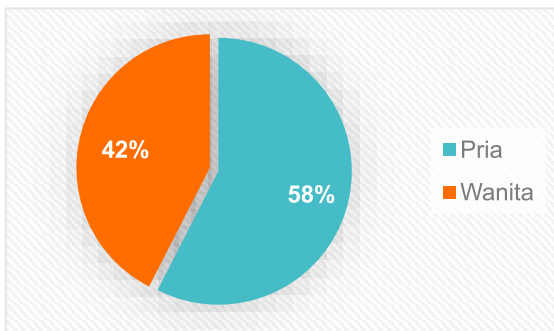


Figure 6 Kementerian/Badan/Lembaga

Untuk responden survei berdasarkan jenis kelamin yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga adalah pria sebesar 58% dan wanita sebesar 42%.

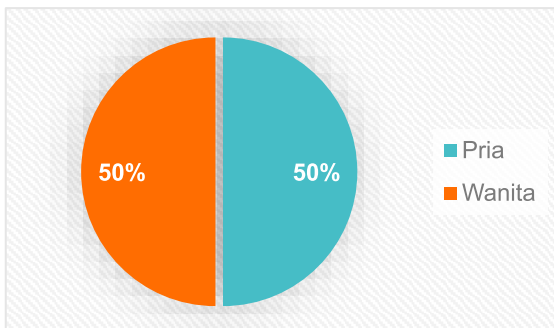


Figure 7 Pemerintah Provinsi

Responden yang berasal dari Pemerintah Provinsi berdasarkan jenis kelamin memiliki jumlah yang seimbang, yaitu untuk pria dan wanita sebesar 50%.

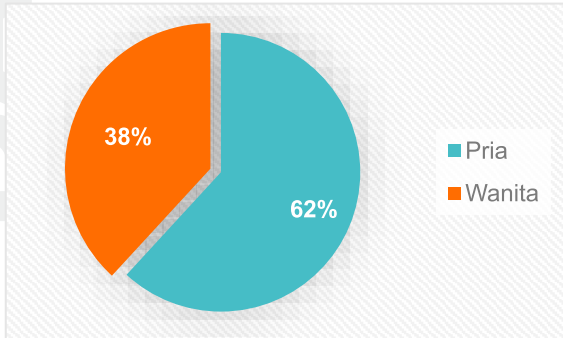


Figure 8 Pemerintah Kabupaten/Kota

Untuk responden yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagian besarnya pria sebesar 62%, sedangkan responden wanita sebesar 38%.

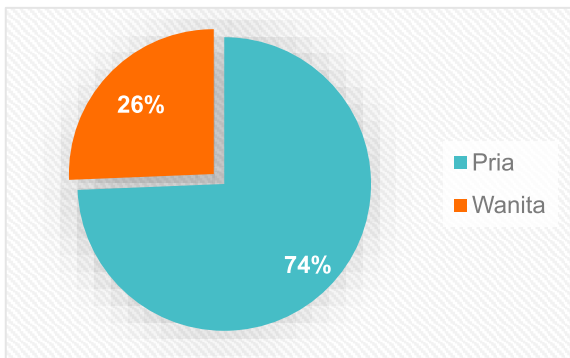


Figure 9 Organisasi sektor publik lainnya

Sedangkan untuk responden yang berasal dari Organisasi sektor publik lainnya didominasi oleh responden pria sebesar 74%, untuk responden wanita hanya 26%.

Usia

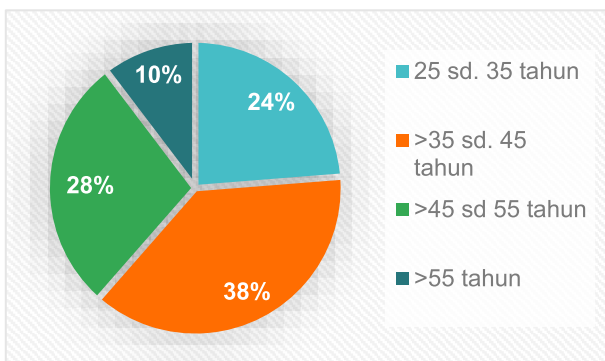


Figure 10 Semua Responden

Rentang usia responden dimulai dari 25 tahun hingga lebih dari 55 tahun. Berdasarkan hasil survei dari total responden, diketahui golongan umur terbanyak responden adalah >35 sampai dengan

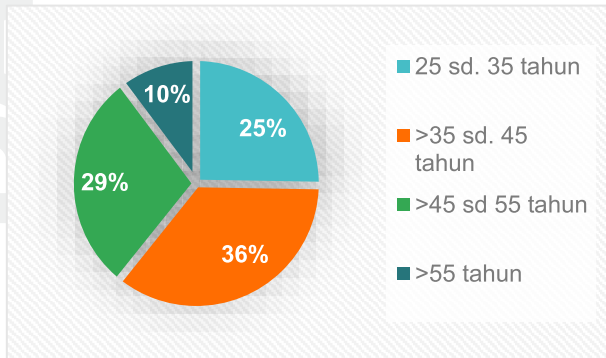


Figure 11 Kementerian/Badan/Lembaga

Untuk rentang usia responden yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga juga didominasi rentang usia >35 sampai dengan 45 tahun sebesar 36%.

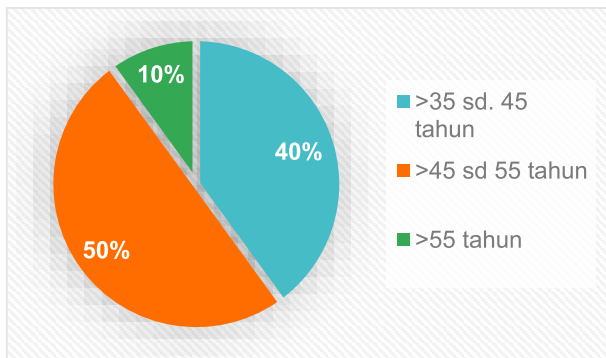


Figure 12 Pemerintah Provinsi

Sedangkan rentang usia responden yang berasal dari Pemerintah Provinsi terbanyak pada rentang usia >45 sd 55 tahun yaitu sebesar 50%.

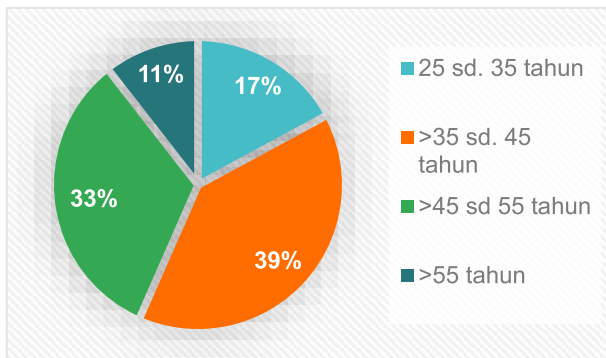


Figure 13 Pemerintah Kabupaten/Kota

Responden yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki jumlah rentang usia terbanyak adalah >35 sd 45 tahun sebesar 39%.

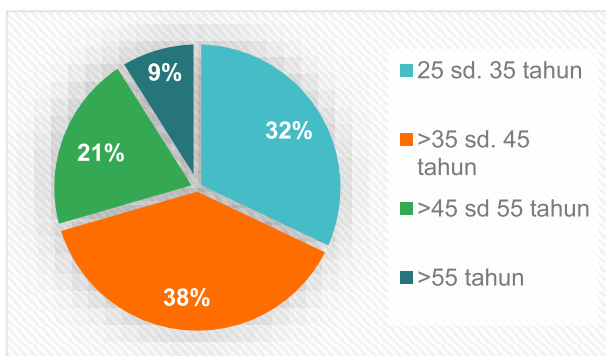


Figure 14 Organisasi sektor publik lainnya

Rentang usia >35 sd 45 tahun juga masih didominasi oleh responden yang berasal dari Organisasi sektor public lainnya.

Memiliki Sertifikat MR

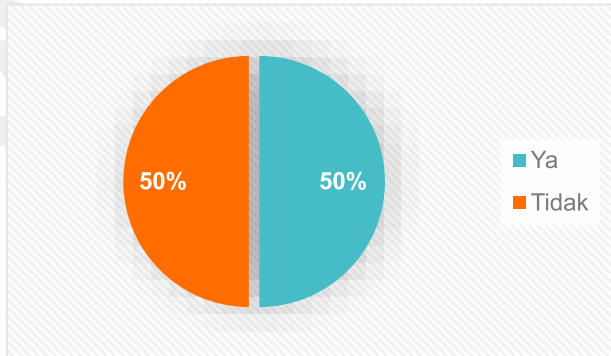


Figure 15 Semua Responden

50% dari total responden yang mengisi survei sudah memiliki sertifikat manajemen risiko.

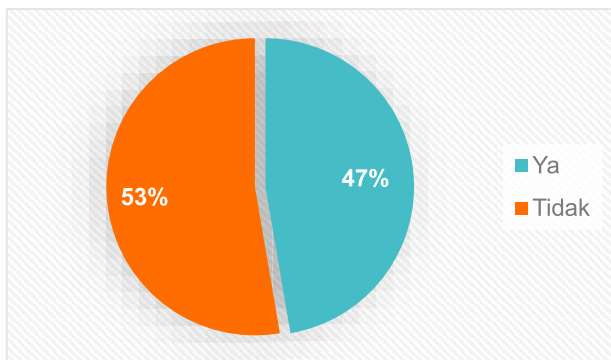


Figure 16 Kementerian/Badan/Lembaga

Untuk responden yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga sebagian besar sebanyak 53% belum memiliki sertifikat manajemen risiko, sedangkan sebanyak 47% sudah memiliki sertifikat manajemen risiko.

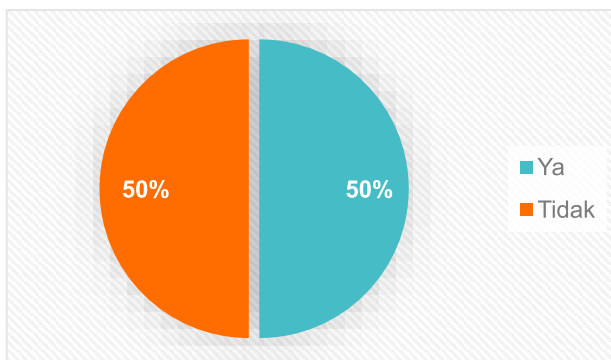


Figure 17 Pemerintah Provinsi

Responden yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sebesar 50% sudah memiliki sertifikat manajemen risiko dan 50% belum memiliki sertifikat.

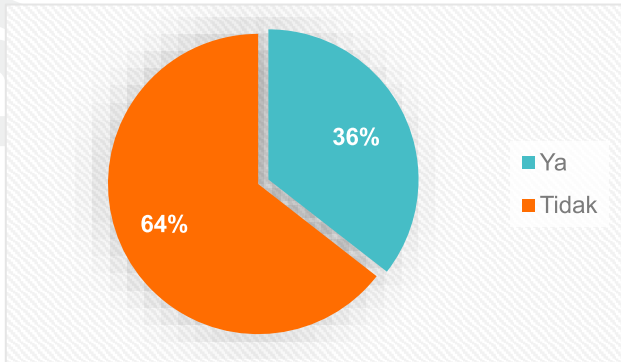


Figure 18 Pemerintah Kabupaten/Kota

Sedangkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk jumlah responden yang sudah memiliki sertifikat manajemen risiko hanya 36%, sisanya 64% masih belum memiliki sertifikat manajemen risiko

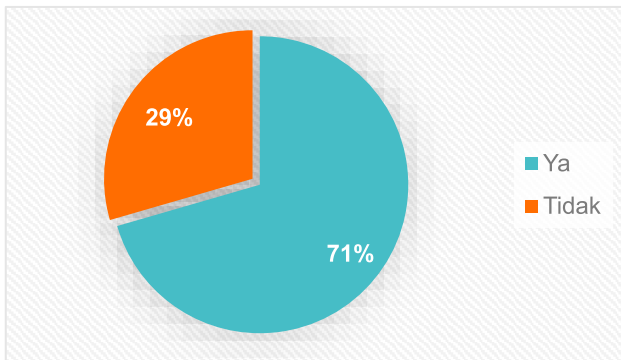


Figure 19 Organisasi sektor publik lainnya

Sebaliknya untuk responden yang berasal dari Organisasi sektor publik lainnya sebesar 71% sudah memiliki sertifikat manajemen risiko, sedangkan responden yang belum memiliki sertifikat manajemen risiko sebesar 29%

BAB 2

PENGUKURAN MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)

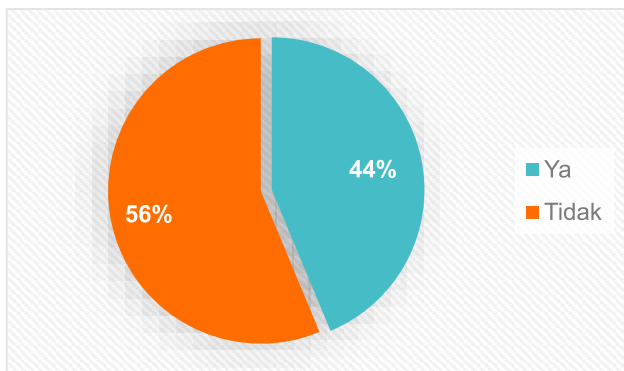


Figure 20 Semua Responden

Berdasarkan grafik di samping dari total responden dari masing-masing organisasi yang sudah mengukur Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) hanya sebesar 44%, sedangkan sebesar 56% masih belum mengukur skor MRI.

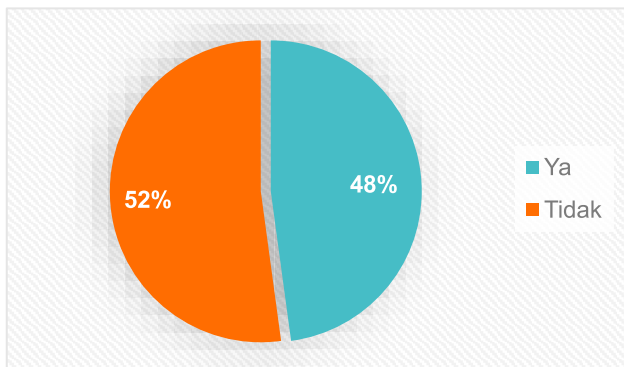


Figure 21 Kementerian/Badan/Lembaga

Untuk responden yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga sebanyak 52% sudah mengukur skor MRI, sedangkan sebesar 48% belum mengukur skor MRI.

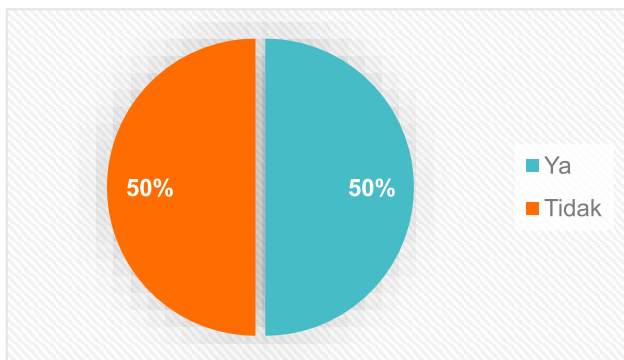


Figure 22 Pemerintah Provinsi

Responden yang berasal dari Pemerintah Provinsi memiliki jumlah yang seimbang untuk pengukuran skor MRI, yaitu 50% sudah mengukur skor MRI dan 50% belum mengukur skor MRI.

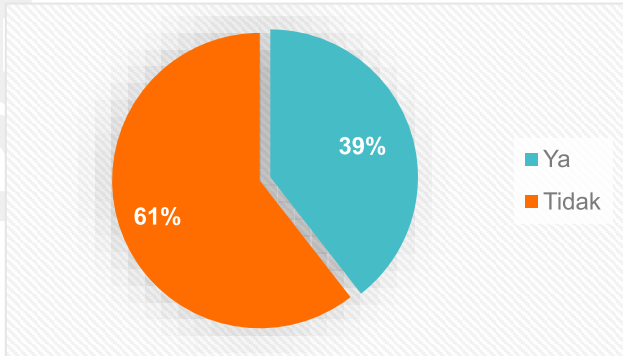


Figure 23 Pemerintah Kabupaten/Kota

Sedangkan responden yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota hanya sebesar 39% yang sudah mengukur skor MRI, sisanya sebesar 61% masih belum mengukur skor MRI.

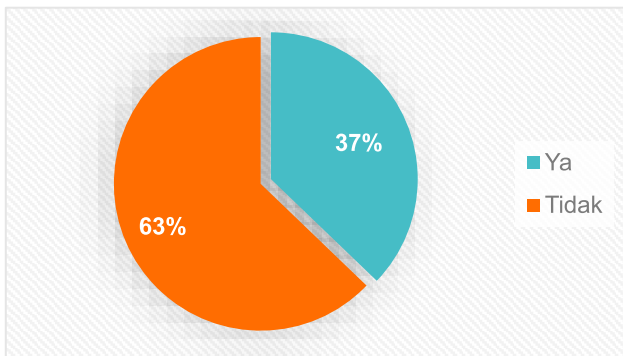


Figure 24 Organisasi sektor publik lainnya

Begitu pula dari responden survei yang berasal dari Organisasi sektor publik lainnya, hanya sebesar 37% saja yang sudah mengukur skor MRI dan sebesar 63% belum mengukur skor MRI.

Item Penilaian MRI

Kualitas perencanaan

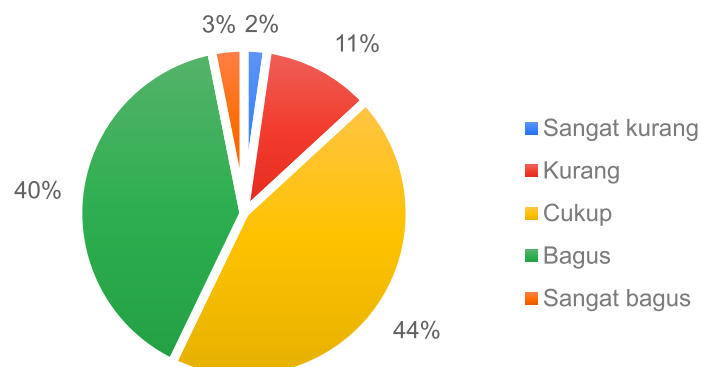


Figure 25 Semua Responden

Total responden survei menilai bahwa kualitas perencanaan dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (44%), dengan mayoritas berikutnya (40%) menilai “Bagus” walaupun masih cukup banyak yang menilai “Kurang” (11%).

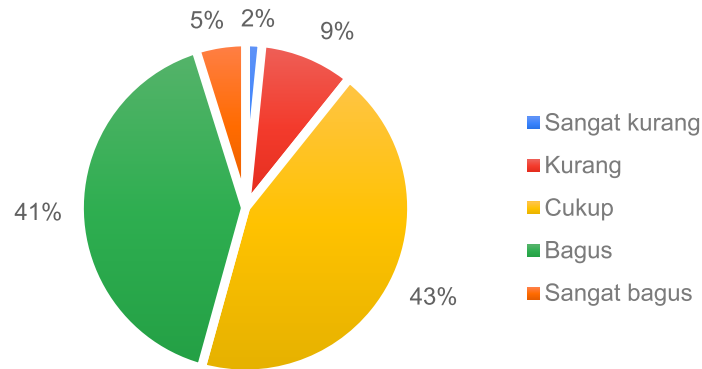


Figure 26 Kementerian/Badan/Lembaga

Responden yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga juga menilai bahwa kualitas perencanaan dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (43%), dengan mayoritas berikutnya (41%) menilai “Bagus” dan (9%) menilai masih “Kurang”.

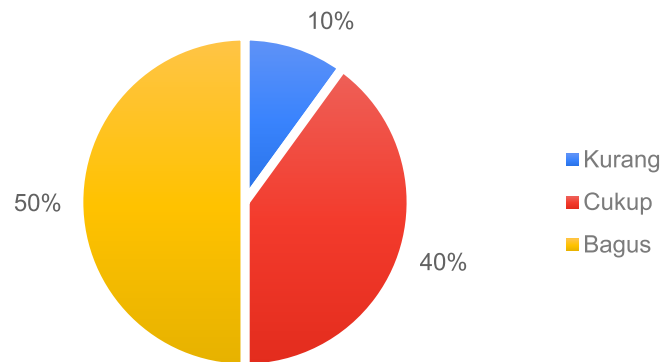


Figure 27 Pemerintah Provinsi

Responden yang berasal dari Pemerintah Provinsi menilai bahwa kualitas perencanaan dalam penilaian MRI dinilai “Bagus” (50%), dengan mayoritas berikutnya (40%) menilai “Cukup” dan (10%) menilai masih “Kurang”.

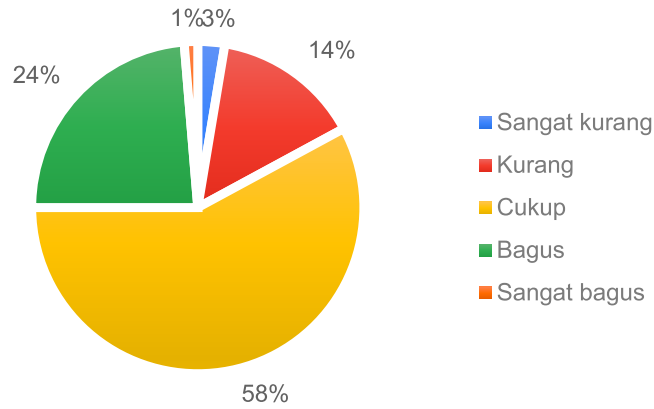


Figure 28 Pemerintah Kabupaten/Kota

Untuk responden yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota menilai bahwa kualitas perencanaan dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (58%), dengan mayoritas berikutnya (24%) menilai “Bagus” dan (14%) menilai masih “Kurang”.

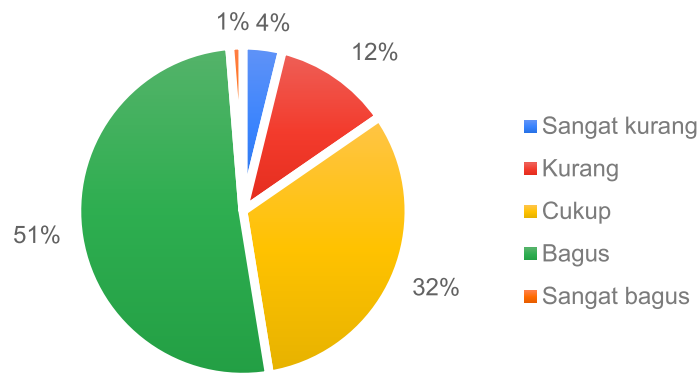


Figure 29 Organisasi sektor publik lainnya

Responden yang berasal dari Organisasi sektor publik lainnya menilai bahwa kualitas perencanaan dalam penilaian MRI dinilai “Bagus” (51%), dengan mayoritas berikutnya (32%) menilai “Cukup” dan (12%) menilai masih “Kurang”.

Kepemimpinan

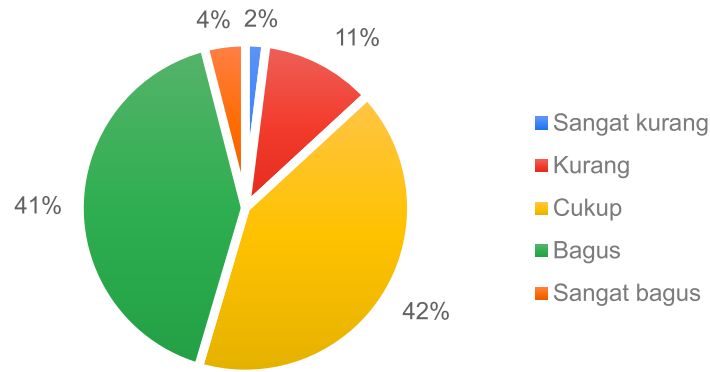


Figure 30 Semua Responden

Total responden survei menilai bahwa kepemimpinan dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (42%), dengan mayoritas berikutnya (41%) menilai “Bagus” walaupun masih cukup banyak yang menilai “Kurang” (11%).

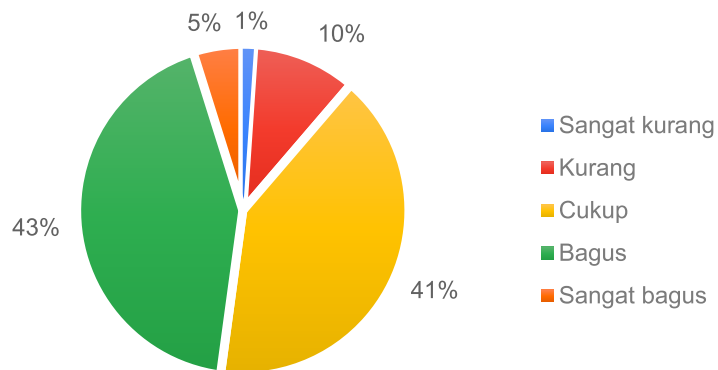


Figure 31 Kementerian/Badan/Lembagai

Responden survei yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga menilai bahwa kepemimpinan dalam penilaian MRI dinilai “Bagus” (43%), dengan mayoritas berikutnya (41%) menilai “Cukup” walaupun masih ada yang menilai “Kurang” (10%).

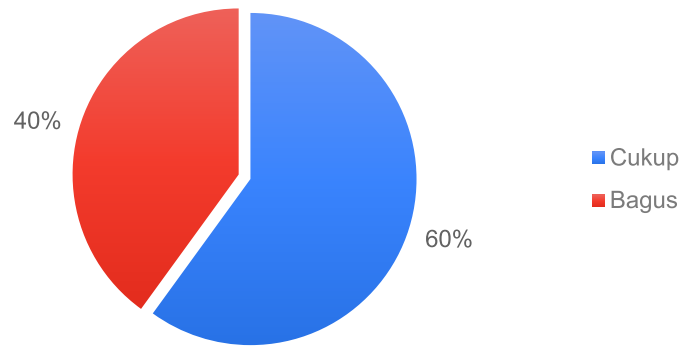


Figure 32 Pemerintah Provinsi

Responden survei yang berasal dari Pemerintah Provinsi menilai bahwa kepemimpinan dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (60%), dengan mayoritas berikutnya (40%) menilai “Bagus”.

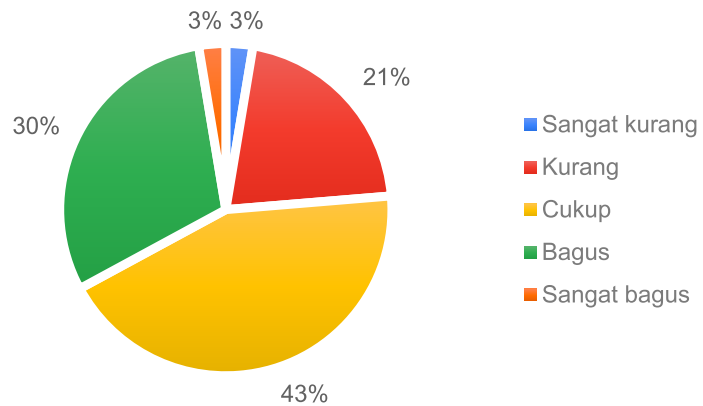


Figure 33 Pemerintah Kabupaten/Kota

Untuk responden survei yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota menilai bahwa kepemimpinan dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (43%), dengan mayoritas berikutnya (30%) menilai “Bagus” walaupun masih cukup banyak yang menilai “Kurang” (21%).

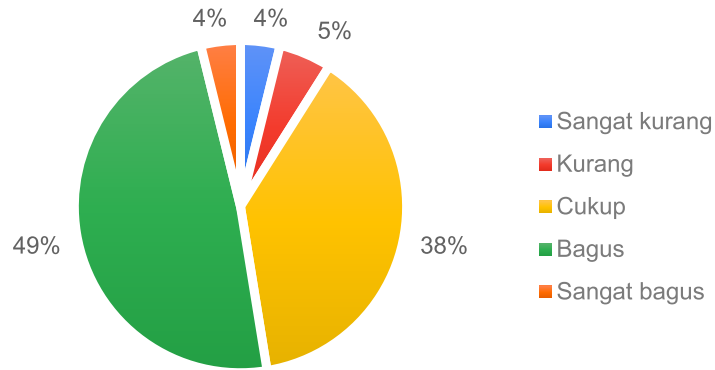


Figure 34 Organisasi sektor publik lainnya

Dan responden survei yang berasal dari Organisasi sektor publik lainnya menilai bahwa kepemimpinan dalam penilaian MRI dinilai “Bagus” (49%), dengan mayoritas berikutnya (38%) menilai “Cukup” walaupun masih ada yang menilai “Kurang” (5%).

Kebijakan Manajemen Risiko

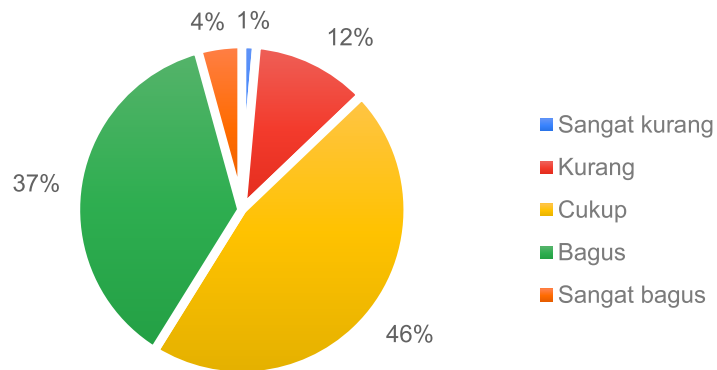


Figure 35 Semua Responden

Untuk responden survei yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota menilai bahwa kepemimpinan dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (43%), dengan mayoritas berikutnya (30%) menilai “Bagus” walaupun masih cukup banyak yang menilai “Kurang” (21%).

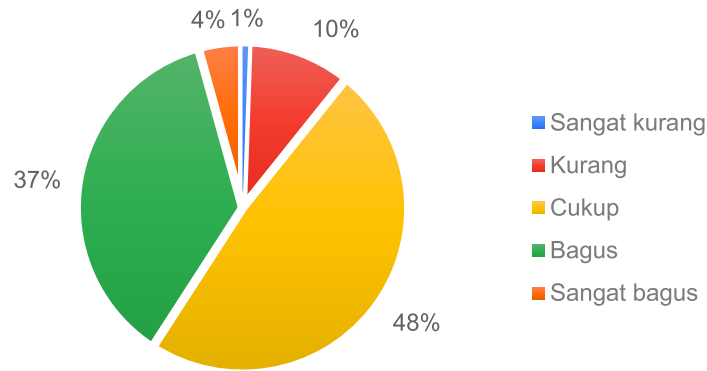


Figure 36 Kementerian/Badan/Lembaga

Untuk responden survei yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga menilai bahwa kebijakan manajemen risiko dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (48%), dengan mayoritas berikutnya (37%) menilai “Bagus” dan sebanyak (10%) menilai masih “Kurang”.

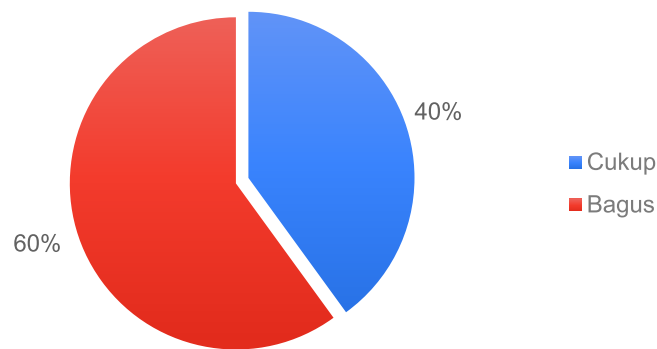


Figure 37 Pemerintah Provinsi

Responden survei yang berasal dari Pemerintah Provinsi menilai bahwa kebijakan manajemen risiko dalam penilaian MRI dinilai “Bagus” (60%), dengan mayoritas berikutnya (40%) menilai “Cukup”.

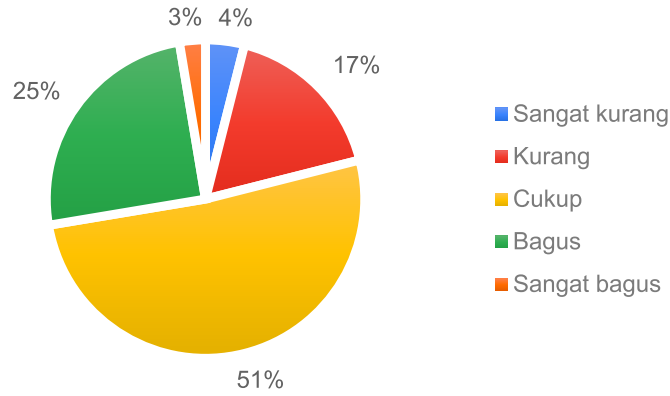


Figure 38 Pemerintah Kabupaten/Kota

Untuk responden survei yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota menilai bahwa kebijakan manajemen risiko dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (51%), dengan mayoritas berikutnya (25%) menilai “Bagus” walaupun masih cukup banyak yang menilai “Kurang” (17%).

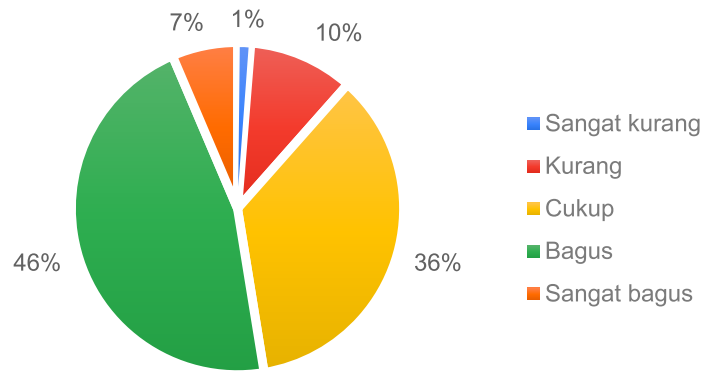


Figure 39 Organisasi sektor publik lainnya

Untuk responden survei yang berasal dari Organisasi sektor publik lainnya menilai bahwa kebijakan manajemen risiko dalam penilaian MRI dinilai “Bagus” (46%), dengan mayoritas berikutnya (36%) menilai “Cukup” walaupun masih ada yang menilai “Kurang” (10%).

Sumber Daya Manusia

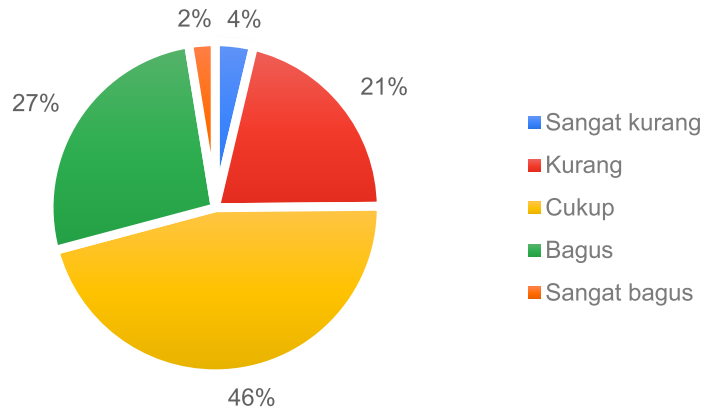


Figure 40 Semua Responden

Semua responden survei menilai bahwa sumber daya manusia dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (46%), dengan mayoritas berikutnya (27%) menilai “Bagus” walaupun masih ada yang menilai “Kurang” (21%).

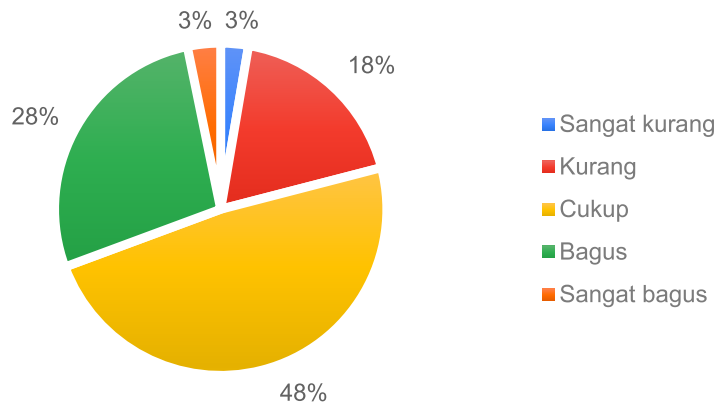


Figure 41 Kementerian/Badan/Lembaga

Untuk responden survei yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga menilai bahwa sumber daya manusia dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (48%), dengan mayoritas berikutnya (28%) menilai “Bagus” walaupun masih ada yang menilai “Kurang” (18%).

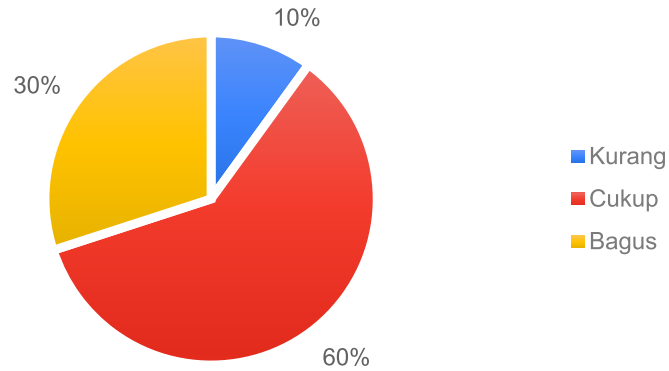


Figure 42 Pemerintah Provinsi

Responden survei yang berasal dari Pemerintah Provinsi menilai bahwa sumber daya manusia dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (60%), dengan mayoritas berikutnya (30%) menilai “Bagus” walaupun masih ada yang menilai “Kurang” (10%).

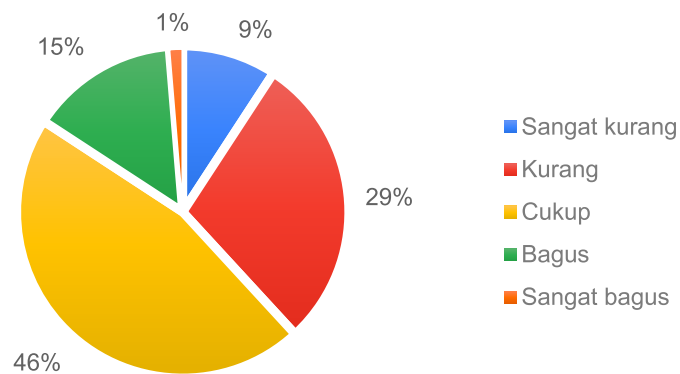


Figure 43 Pemerintah Kabupaten/Kota

Sedangkan responden survei yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota menilai bahwa sumber daya manusia dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (46%), dengan mayoritas berikutnya (29%) menilai masih “Kurang” walaupun masih ada yang menilai “Bagus” (15%).

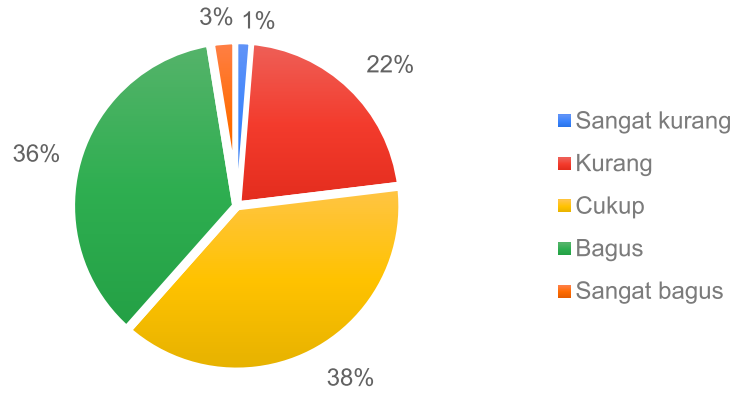


Figure 44 Organisasi sektor publik lainnya

Untuk responden survei yang berasal dari Organisasi sektor publik lainnya menilai bahwa sumber daya manusia dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (38%), dengan mayoritas berikutnya (36%) menilai “Bagus” walaupun masih ada yang menilai “Kurang” (22%).

Kemitraan

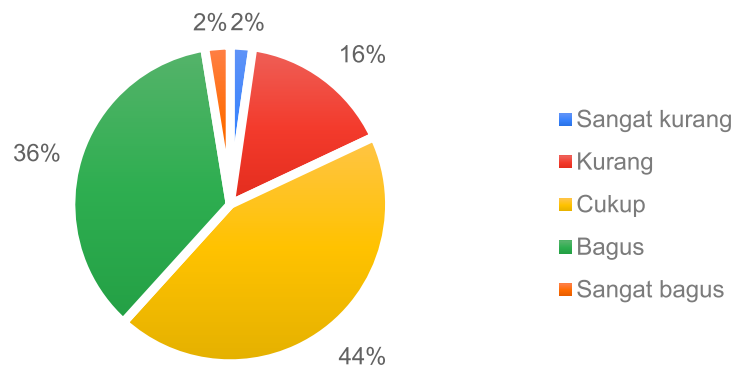


Figure 45 Semua Responden

Semua responden survei menilai bahwa kemitraan dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (44%), dengan mayoritas berikutnya (36%) menilai “Bagus” walaupun masih ada yang menilai “Kurang” (16%).

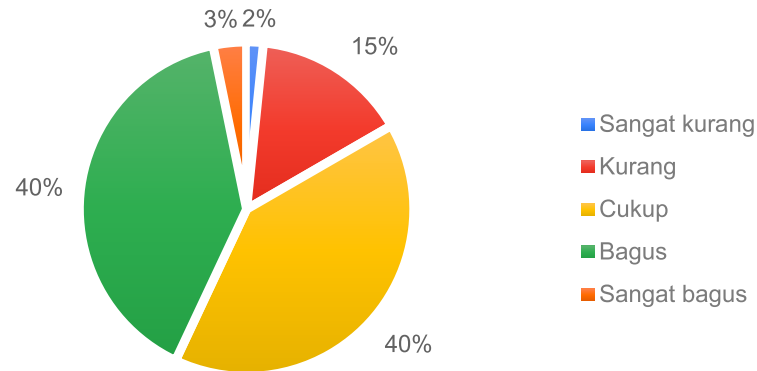


Figure 46 Kementerian/Badan/Lembaga

Untuk responden survei yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga menilai bahwa kemitraan dalam penilaian MRI juga “Cukup” memadai (40%), dengan mayoritas berikutnya (40%) menilai “Bagus” walaupun masih ada yang menilai “Kurang” (15%).

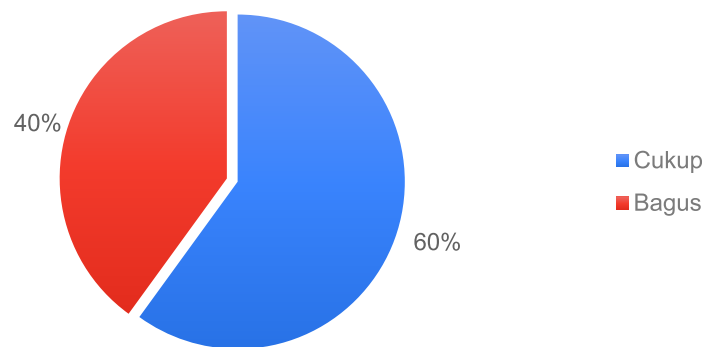


Figure 47 Pemerintah Provinsi

responden survei yang berasal dari Pemerintah Provinsi menilai bahwa kemitraan dalam penilaian MRI juga “Cukup” memadai (60%), dengan mayoritas berikutnya (40%) menilai “Bagus”.

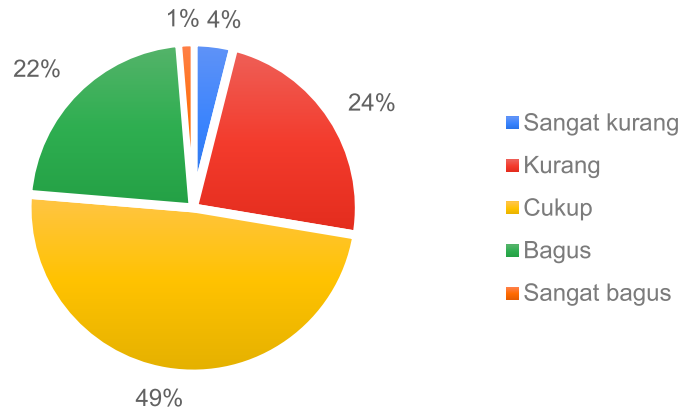


Figure 48 Pemerintah Kabupaten/Kota

Sedangkan responden survei yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota menilai bahwa kemitraan dalam penilaian MRI juga “Cukup” memadai (49%), dengan mayoritas berikutnya (24%) menilai masih “Kurang” dan menilai “Bagus” (22%).

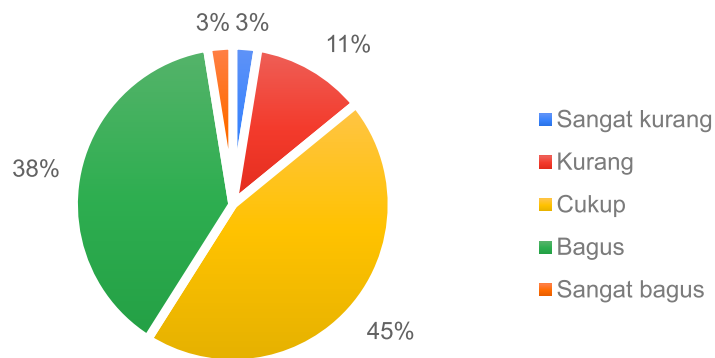


Figure 49 Organisasi sektor publik lainnya

Untuk responden survei yang berasal dari Organisasi sektor public lainnya menilai bahwa kemitraan dalam penilaian MRI juga “Cukup” memadai (45%), dengan mayoritas berikutnya (38%) menilai “Bagus” dan menilai masih “Kurang” (11%).

Proses Manajemen Risiko

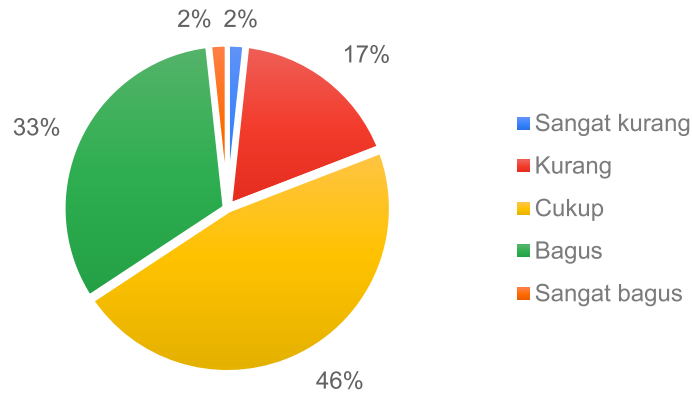


Figure 50 Semua Responden

Semua responden survei menilai bahwa proses manajemen risiko dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (46%), dengan mayoritas berikutnya (33%) menilai “Bagus” walaupun masih ada yang menilai “Kurang” (17%).

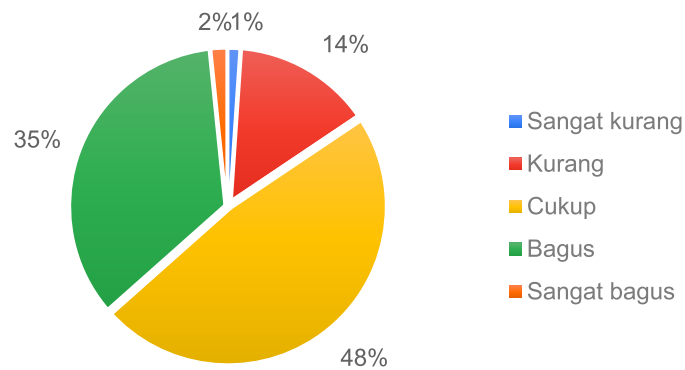


Figure 51 Kementerian/Badan/Lembaga

Untuk responden yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga juga menilai bahwa proses manajemen risiko dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (48%), dengan mayoritas berikutnya (35%) menilai “Bagus” dan yang menilai “Kurang” (14%).

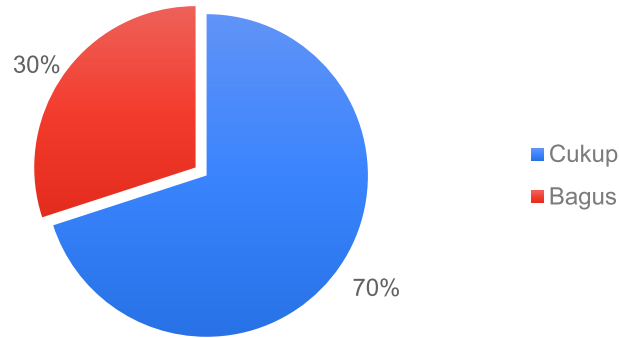


Figure 52 Pemerintah Provinsi

Responden yang berasal dari Pemerintah Provinsi menilai bahwa proses manajemen risiko dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (70%), dengan mayoritas berikutnya (30%) menilai “Bagus”.

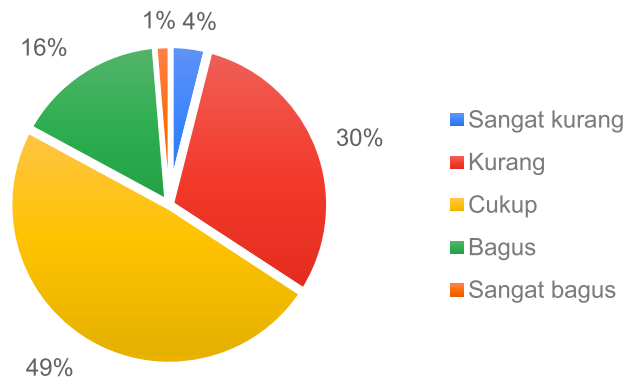


Figure 53 Pemerintah Kabupaten/Kota

Sedangkan responden yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota menilai bahwa proses manajemen risiko dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (49%), dengan mayoritas berikutnya (30%) menilai masih “Kurang” dan menilai “Bagus” (16%).

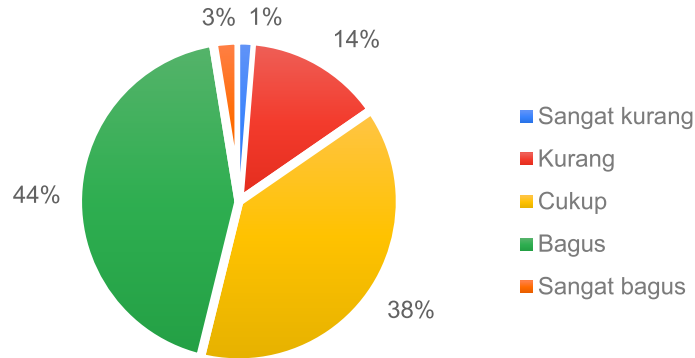


Figure 54 Organisasi sektor publik lainnya

Untuk responden yang berasal dari Organisasi sektor public lainnya menilai bahwa proses manajemen risiko dalam penilaian MRI dinilai “Bagus” (44%), dengan mayoritas berikutnya (38%) menilai “Cukup” dan menilai “Kurang” (14%).

Aktivitas Penanganan Risiko

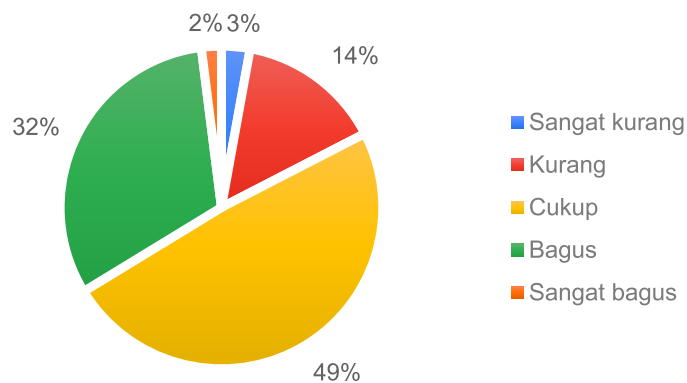


Figure 55 Semua Responden

Semua responden survei menilai bahwa aktivitas penanganan risiko dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (49%), dengan mayoritas berikutnya (32%) menilai “Bagus” walaupun masih ada yang menilai “Kurang” (14%).

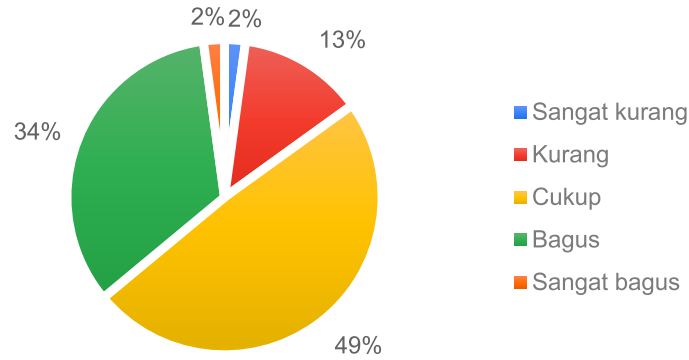


Figure 56 Kementerian/Badan/Lembaga

Untuk responden yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga menilai bahwa aktivitas penanganan risiko dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (49%), dengan mayoritas berikutnya (34%) menilai “Bagus” dan (13%) menilai masih “Kurang”.

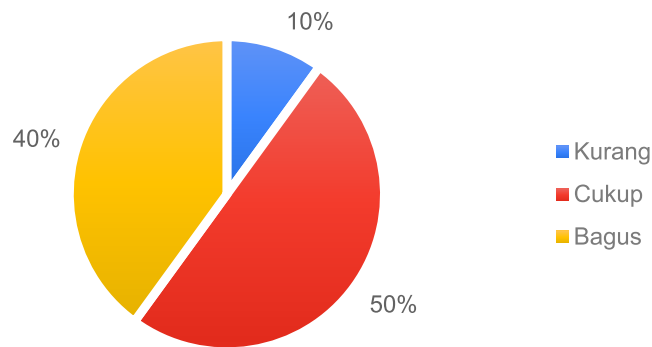


Figure 57 Pemerintah Provinsi

Responden yang berasal dari Pemerintah Provinsi juga menilai bahwa aktivitas penanganan risiko dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (50%), dengan mayoritas berikutnya (40%) menilai “Bagus” dan (10%) menilai masih “Kurang”.

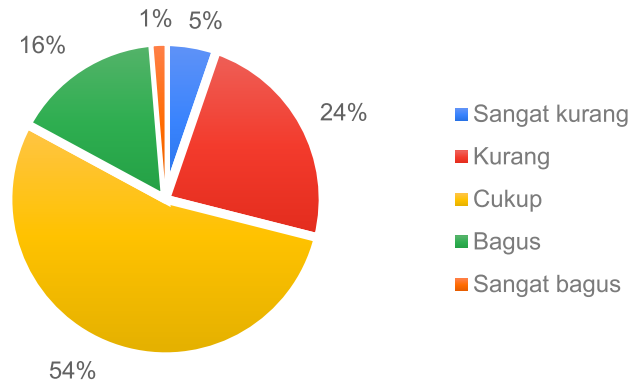


Figure 58 Pemerintah Kabupaten/Kota

Sedangkan responden yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota menilai bahwa aktivitas penanganan risiko dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (54%), dengan mayoritas berikutnya (24%) menilai masih Kurang” dan (16%) menilai “Bagus”.

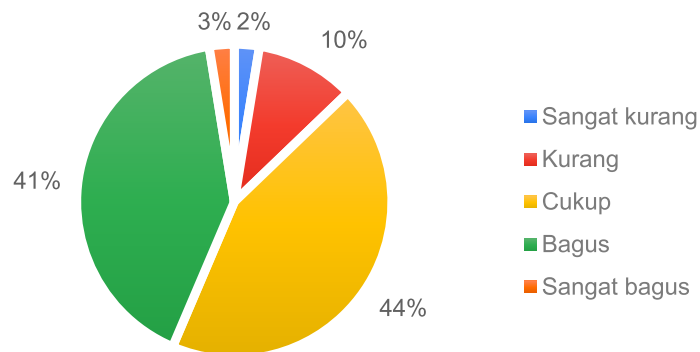


Figure 59 Organisasi sektor public lainnya

Responden yang berasal dari Organisasi sektor publik lainnya menilai bahwa aktivitas penanganan risiko dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (44%), dengan mayoritas berikutnya (41%) menilai “Bagus” dan (10%) menilai masih “Kurang”.

Outcomes

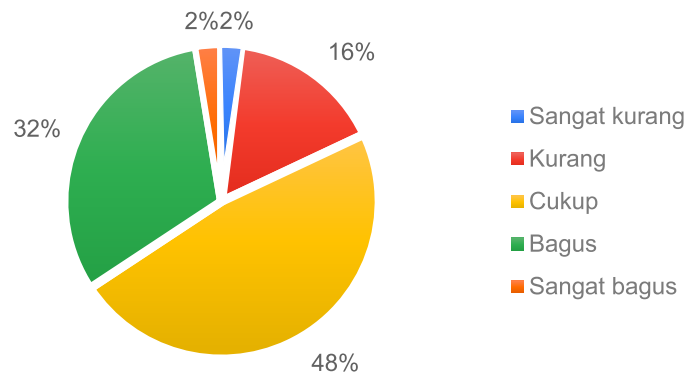


Figure 60 Semua responden

Semua responden survei menilai bahwa outcomes dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (48%), dengan mayoritas berikutnya (32%) menilai “Bagus” dan (16%) menilai masih “Kurang”.

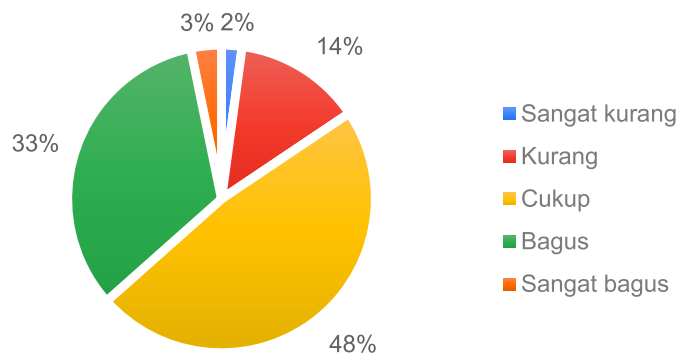


Figure 61 Kementerian/Badan/Lembaga

Responden yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga menilai bahwa outcomes dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (44%), dengan mayoritas berikutnya (41%) menilai “Bagus” dan (10%) menilai masih “Kurang”.

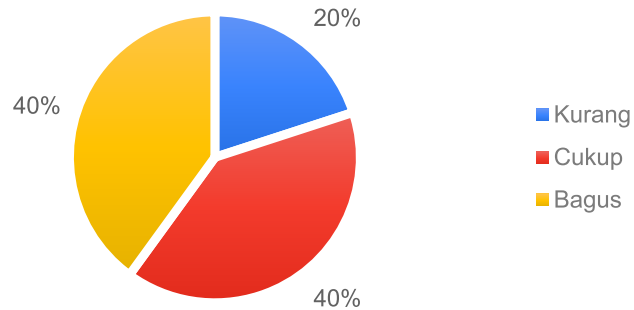


Figure 62 Pemerintah Provinsi

Responden yang berasal dari Pemerintah Provinsi juga menilai bahwa outcomes dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (40%), dengan mayoritas berikutnya (40%) menilai “Bagus” dan (20%) menilai masih “Kurang”.

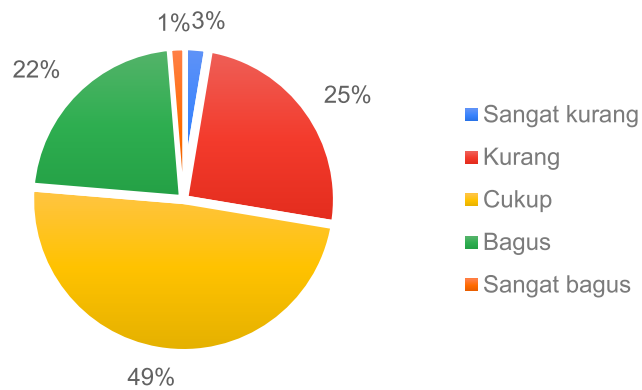


Figure 63 Pemerintah Kabupaten/Kota

Responden yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota juga menilai bahwa outcomes dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (49%), dengan mayoritas berikutnya (25%) menilai masih “Kurang” dan (22%) menilai “Bagus”.

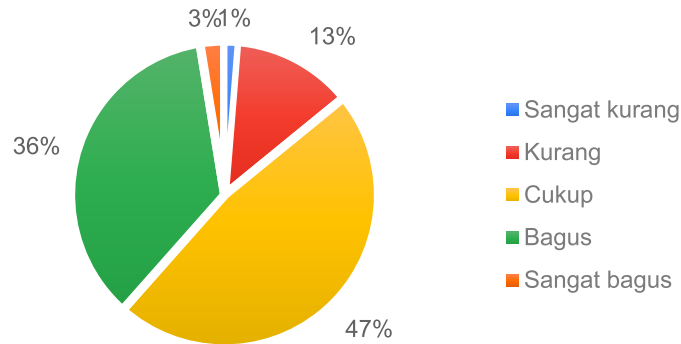


Figure 64 Organisasi sektor publik lainnya

Responden yang berasal dari Organisasi sektor publik lainnya menilai bahwa outcomes dalam penilaian MRI “Cukup” memadai (47%), dengan mayoritas berikutnya (36%) menilai sudah “Bagus” dan (13%) menilai masih “Kurang”.

Kesiapan organisasi sektor publik dalam mencapai target MRI level 3 tahun 2024

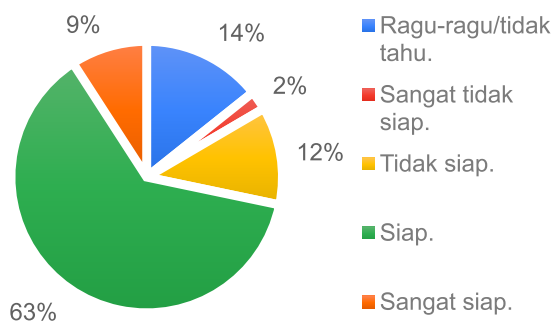


Figure 65 Semua Responden

Meski sebagian besar (63%) dari total responden dari masing-masing organisasi “Siap” dalam mencapai target MRI level 3 tahun 2024, jawaban “Tidak siap” menempati urutan ketiga terbanyak yang dipilih responden (12%). Sisanya, responden menilai organisasi mereka “Sangat siap” (9%), “Sangat tidak siap” (2%), dan “Ragu-ragu/tidak tahu” (14%). Figure 65 Semua Responden Dari jawaban ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas organisasi responden telah memiliki kesiapan dalam mencapai target MRI level 3 tahun 2024.

BAB 2

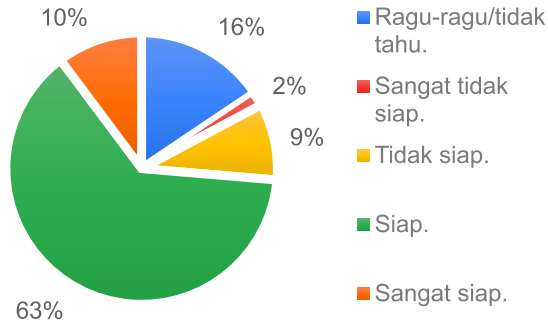


Figure 66 Kementerian/Badan/Lembaga

Begitu pula hasil survei responden yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga, 63% menyatakan “Siap” dalam mencapai target MRI level 3 tahun 2024.

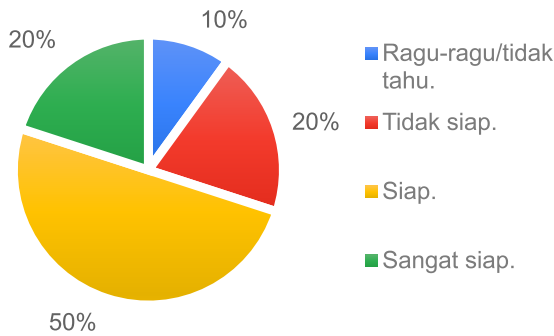


Figure 67 Pemerintah Provinsi

Untuk responden yang berasal dari Pemerintah Provinsi juga demikian, sebesar 50% “Siap” untuk mencapai target MRI level 3 tahun 2024.

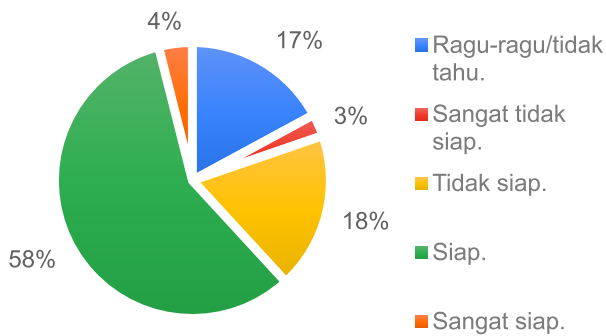
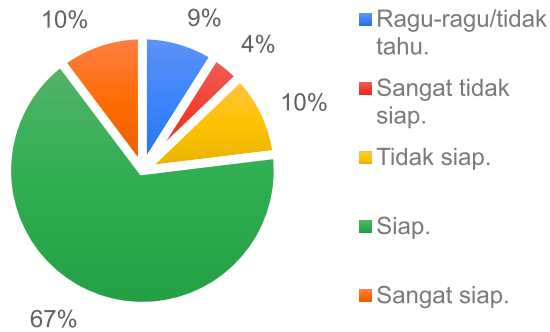


Figure 68 Pemerintah Kabupaten/Kota

Sama halnya dengan dengan responden yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga dan Pemerintah Provinsi, responden yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota juga sebesar 58% menyatakan “Siap” untuk mencapai target



Responden survei yang berasal dari Organisasi sektor publik lainnya sebesar 67% juga “Siap” untuk mencapai target MRI level 3 tahun 2024.

Figure 69 Pemerintah Kabupaten/Kota

Kapasitas yang perlu ditingkatkan untuk mencapai target MRI level 3

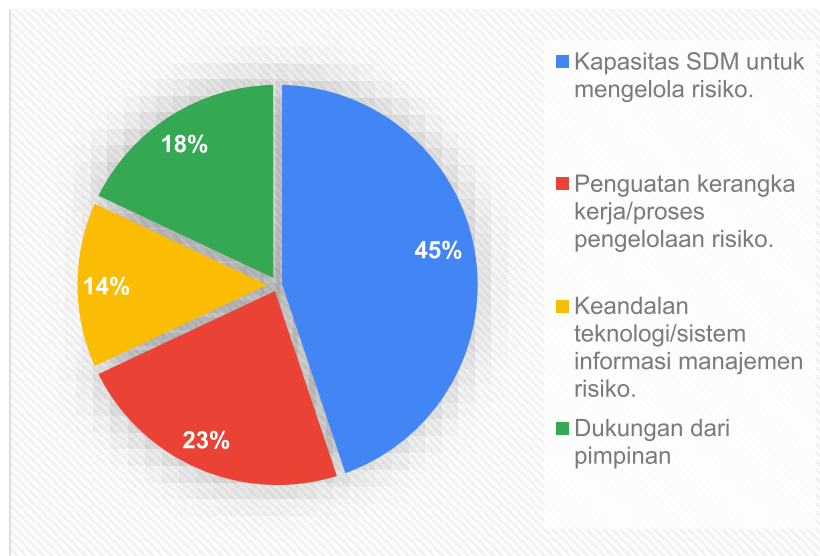


Figure 70 Semua Responden

Dalam rangka mencapai target MRI level 3 tahun 2024, dari semua total responden paling banyak memilih “kapasitas SDM untuk mengelola risiko” sebagai kapasitas internal organisasi yang diharapkan dapat ditingkatkan (45%). Selain itu, responden juga meyakini bahwa “penguatan kerangka kerja/proses pengelolaan risiko” (23%), “dukungan dari pimpinan” (18%), dan keandalan teknologi/sistem informasi manajemen risiko” (14%) yang merupakan bagian dari kesiapan organisasi dalam mencapai target MRI level 3 tahun 2024.

BAB 2

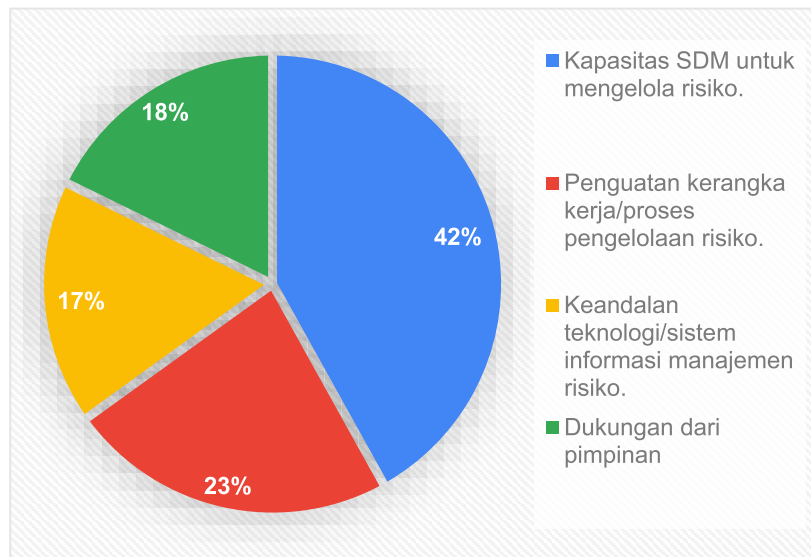


Figure 71 Kementerian/Badan/Lembaga

Hal serupa juga disuarakan oleh responden yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga yang banyak memilih “kapasitas SDM untuk mengelola risiko” (42%), “penguatan kerangka kerja/proses pengelolaan risiko” (23%), “dukungan dari pimpinan” (18%), dan keandalan teknologi/sistem informasi manajemen risiko” (17%) yang merupakan bagian dari kesiapan organisasi dalam mencapai target MRI level 3 tahun 2024.

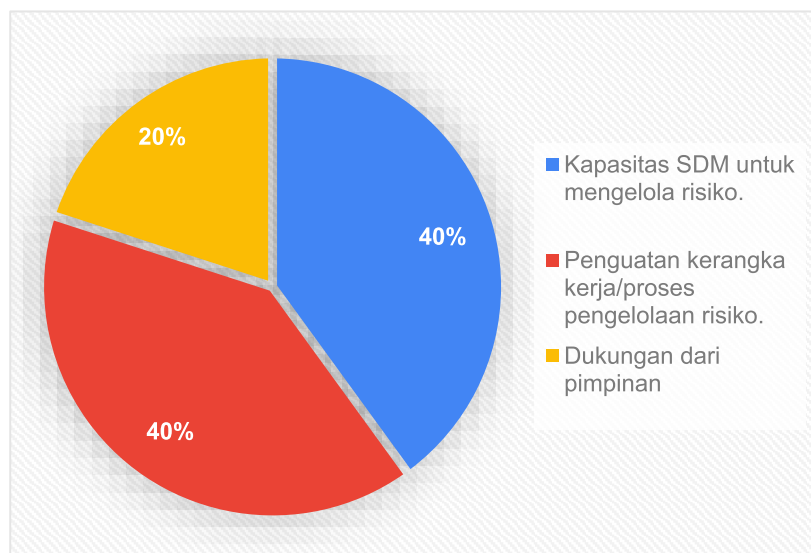


Figure 72 Pemerintah Provinsi

Untuk responden yang berasal dari Pemerintah Provinsi untuk mencapai target MRI level 3 tahun 2024 paling banyak memilih “kapasitas SDM untuk mengelola risiko” (40%), “penguatan kerangka kerja/proses pengelolaan risiko” (40%), dan “dukungan dari pimpinan” sebesar 20% yang merupakan bagian dari kesiapan organisasi dalam mencapai target MRI level 3 tahun 2024.

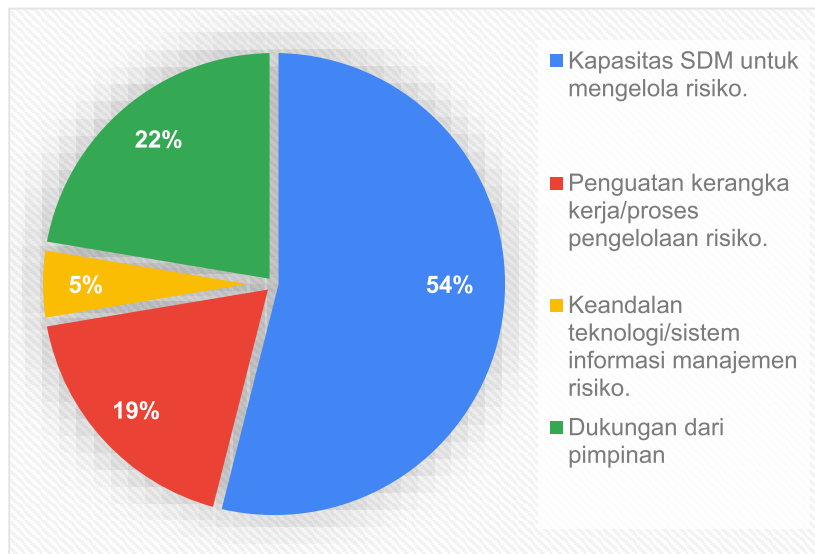


Figure 73 Pemerintah Kabupaten/Kota

Responden survei yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota, sama halnya dengan organisasi di atas paling banyak memilih “kapabilitas SDM untuk mengelola risiko” (54%), “penguatan kerangka kerja/proses pengelolaan risiko” (19%), “dukungan dari pimpinan” (22%), dan keandalan teknologi/sistem informasi manajemen risiko” (5%) yang merupakan bagian dari kesiapan organisasi dalam mencapai target MRI level

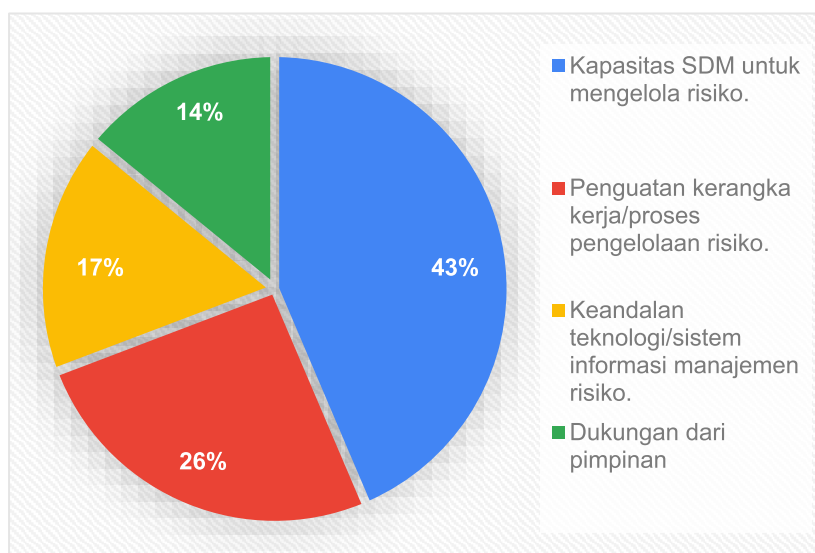


Figure 74 Organisasi sektor publik lainnya

Hal yang sama juga diutarakan oleh responden survei yang berasal dari Organisasi sektor publik lainnya yang banyak memilih memilih “kapabilitas SDM untuk mengelola risiko” (43%), “penguatan kerangka kerja/proses pengelolaan risiko” (26%), “keandalan teknologi/sistem informasi manajemen risiko” (17%), dan peringkat terakhir “dukungan dari pimpinan” (14%) yang merupakan bagian dari kesiapan organisasi dalam mencapai target MRI level 3 tahun 2024.

KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Menyambung isu kesiapan organisasi dalam mencapai target MRI level 3 tahun 2024, survei ini juga menyediakan kesempatan bagi para responden untuk sekaligus berbagi pandangan dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko di lingkungan organisasi.

Kompetensi SDM di Bidang Manajemen Risiko

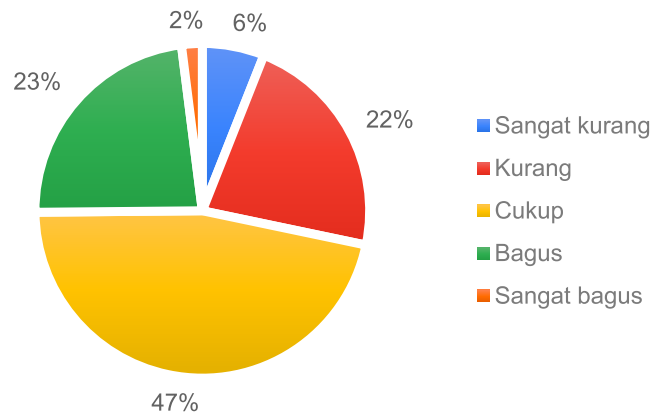


Figure 75 Semua Responden

Semua responden survei menilai bahwa kompetensi SDM di bidang manajemen risiko “Cukup” memadai (47%), dengan mayoritas berikutnya (23%) menilai “Bagus” walaupun masih cukup banyak yang menilai “Kurang” (22%).

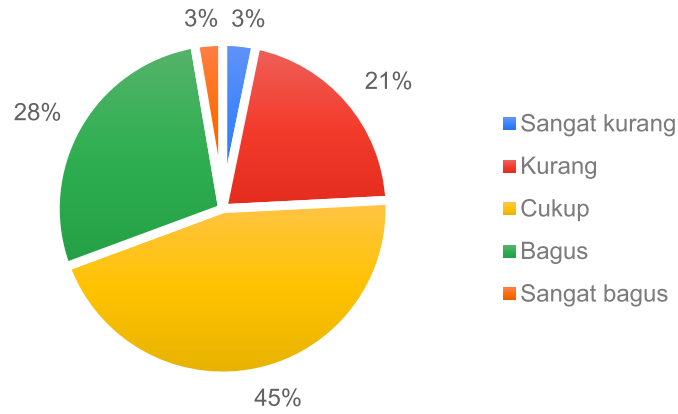


Figure 76 Kementrian/Badan/Lembaga

Untuk responden yang berasal dari Kementrian/Badan/Lembaga juga menilai kompetensi SDM di bidang manajemen risiko “Cukup” memadai (45%), dengan mayoritas berikutnya (28%) menilai “Bagus”.

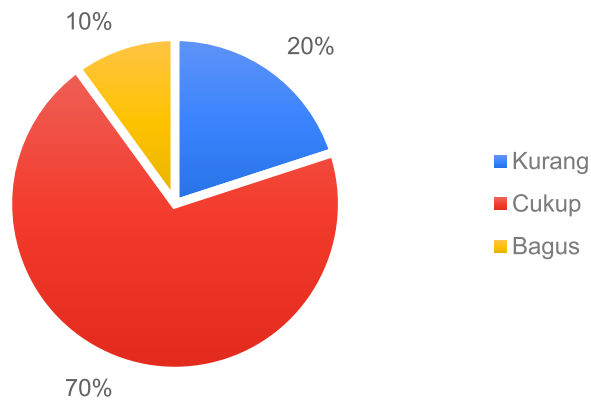


Figure 77 Pemerintah Provinsi

Sesuai grafik diatas, responden yang berasal dari Pemerintah Provinsi menilai kompetensi SDM di bidang manajemen risiko “Cukup” memadai (70%), dengan mayoritas berikutnya (20%) menilai “Kurang”.

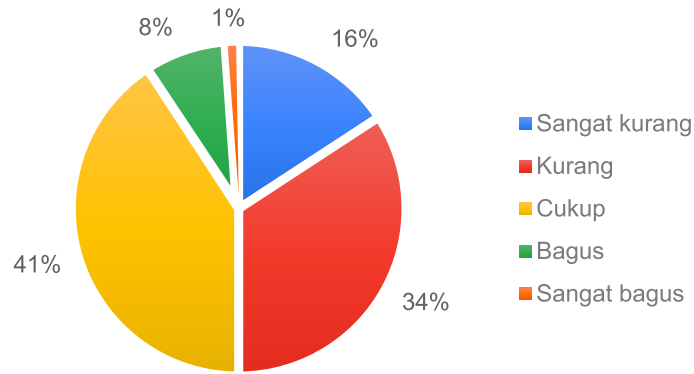


Figure 78 Pemerintah Kabupaten/Kota

Responden yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota menilai kompetensi SDM di bidang manajemen risiko “Cukup” memadai (70%), dan disusul (34%) menilai “Kurang”.

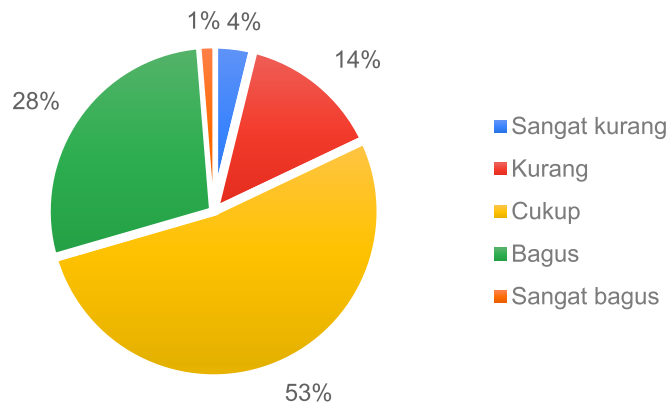


Figure 79 Organisasi sektor publik lainnya

Untuk responden yang berasal dari Organisasi sektor publik lainnya juga menilai kompetensi SDM di bidang manajemen risiko “Cukup” memadai (53%), dan (28%) menilai “Bagus”.

Keterlibatan Para Pemilik Risiko

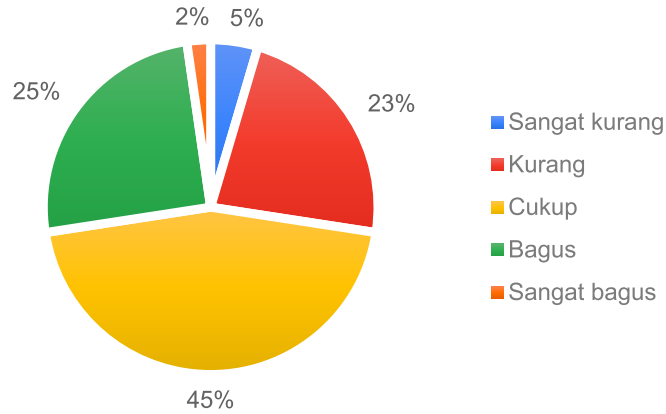


Figure 80 Semua Responden

Selain kompetensi SDM di bidang manajemen risiko, kebanyakan responden juga meyakini bahwa keterlibatan para pemilik risiko sudah “Cukup” memadai (45%) dalam mendukung praktik manajemen risiko di lingkungan organisasi. Bahkan, sebagian besar responden lainnya yang menilai keterlibatan para pemilik

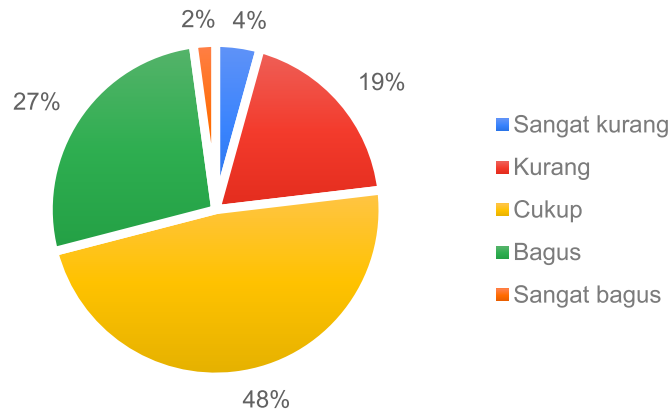


Figure 81 Kementerian/Badan/Lembaga

Responden yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga juga meyakini bahwa keterlibatan para pemilik risiko sudah “Cukup” memadai sebesar 48%.

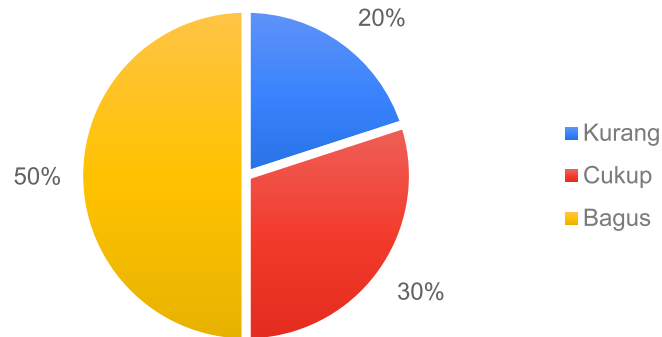


Figure 82 Pemerintah Provinsi

Sesuai dengan grafik di atas responden yang berasal dari Pemerintah Provinsi juga menilai bahwa keterlibatan para pemilik risiko sudah “Cukup” memadai sebesar 50%.

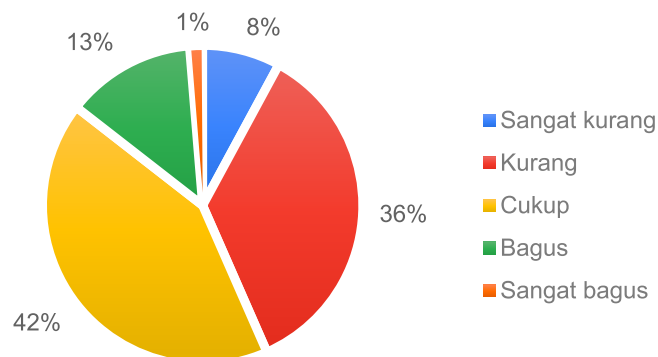


Figure 83 Pemerintah Kabupaten/Kota

Untuk responden yang berasal dari Pemerintah Provinsi juga selaras menilai bahwa keterlibatan para pemilik risiko sudah “Cukup” memadai sebesar 42%.

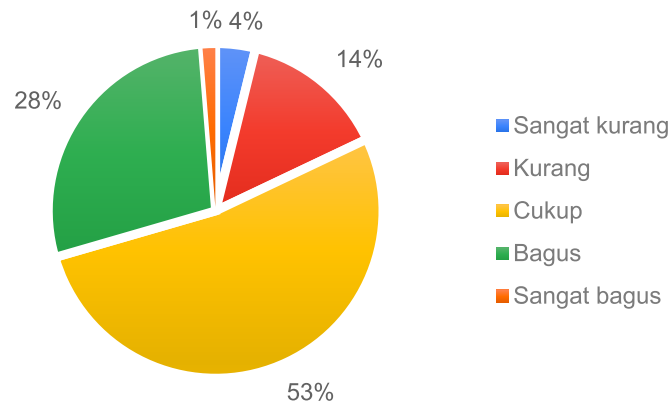


Figure 84 Organisasi sektor publik lainnya

Untuk responden yang berasal dari Pemerintah Provinsi juga selaras menilai bahwa keterlibatan para pemilik risiko sudah “Cukup” memadai sebesar 42%.

Kualitas laporan manajemen risiko yang dihasilkan

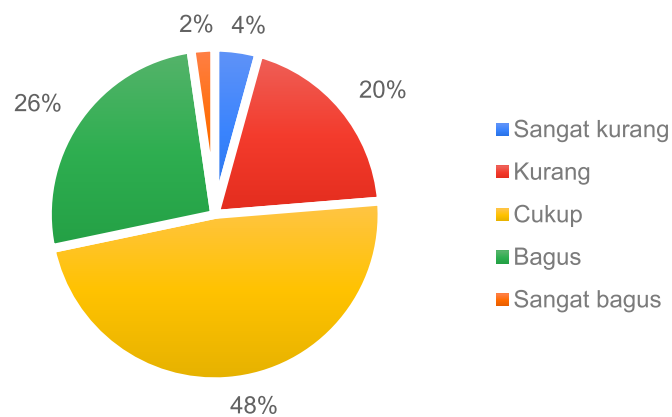


Figure 85 Semua Responden

Dari grafik di atas semua responden menilai bahwa kualitas laporan manajemen risiko sudah “Cukup” terselenggarakan dengan efektif (48%), bahkan menilai sudah “Bagus” (26%). Meski demikian, beberapa responden lainnya mendeskripsikan kualitas manajemen risiko di organisasi mereka masih “Kurang” (20%).

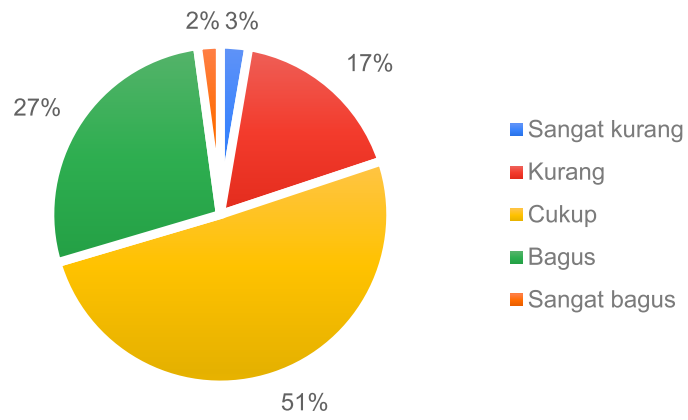


Figure 86 Kementerian/Badan/Lembaga

Untuk responden yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga juga menilai bahwa kualitas laporan manajemen risiko sudah “Cukup” terselenggarakan dengan efektif sebesar 51%.

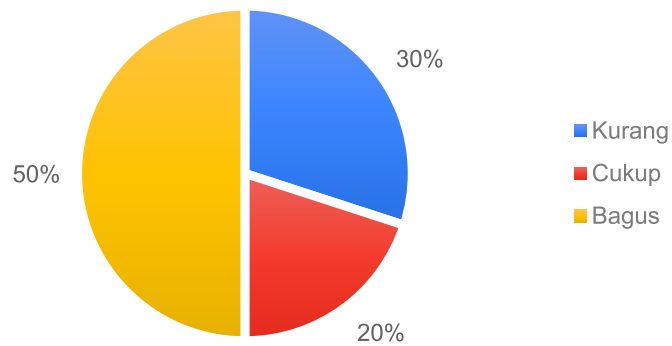


Figure 87 Pemerintah Provinsi

Sedangkan responden yang berasal dari Pemerintah Provinsi menilai bahwa kualitas laporan manajemen risiko sudah “Bagus” sebesar 50%.

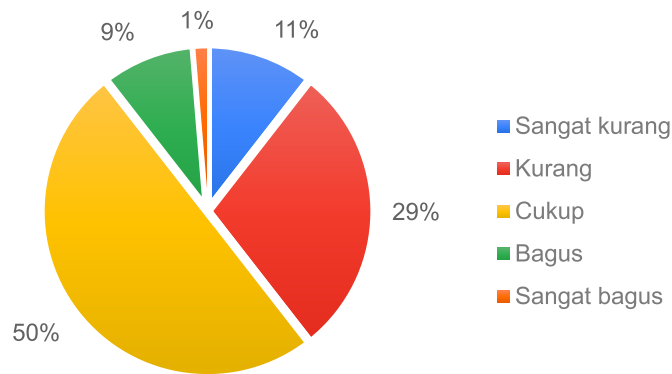


Figure 88 Pemerintah Kabupaten/Kota

Untuk responden yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota menilai bahwa kualitas laporan manajemen risiko sudah “cukup” terselenggarakan dengan efektif sebesar 50%.

Teknologi/sistem informasi pendukung yang digunakan

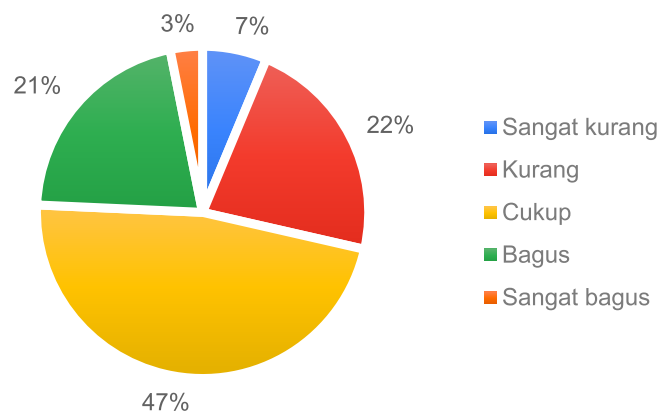


Figure 89 Semua Responden

Mendukung praktik manajemen risiko, semua responden survei menilai “Cukup” terhadap teknologi/sistem informasi manajemen risiko yang mereka gunakan (47%). Hasil ini disusul oleh jawaban “Kurang” (22%) dan “Bagus” (21%).

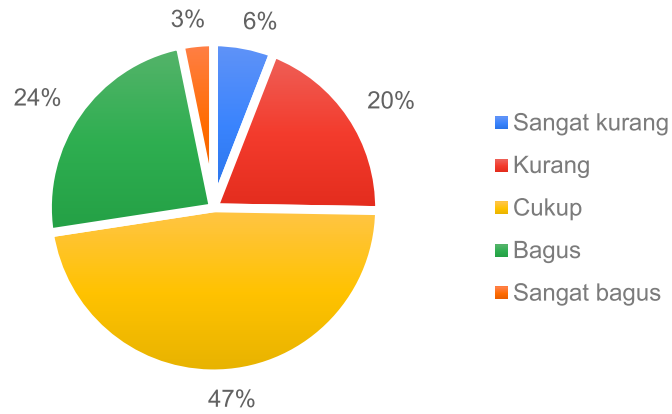


Figure 90 Kemeterian/Badan/Lembaga

Responden survei yang berasal dari Kemeterian/Badan/Lembaga juga menilai “Cukup” terhadap teknologi/sistem informasi manajemen risiko yang mereka gunakan (47%). Hasil ini disusul oleh jawaban “Bagus” (22%) dan “Kurang” (20%).

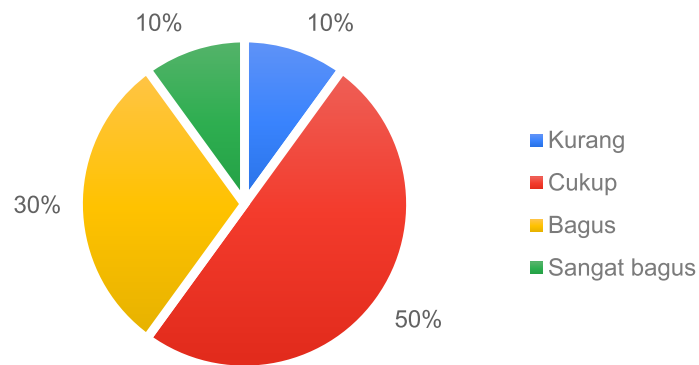


Figure 91 Pemerintah Provinsi

Responden survei yang berasal dari Pemerintah Provinsi juga menilai “Cukup” terhadap teknologi/sistem informasi manajemen risiko yang mereka gunakan (50%). Hasil ini disusul oleh jawaban “Bagus” (30%), “Sangat Bagus” dan “Kurang” sama sama sebesar 10%.

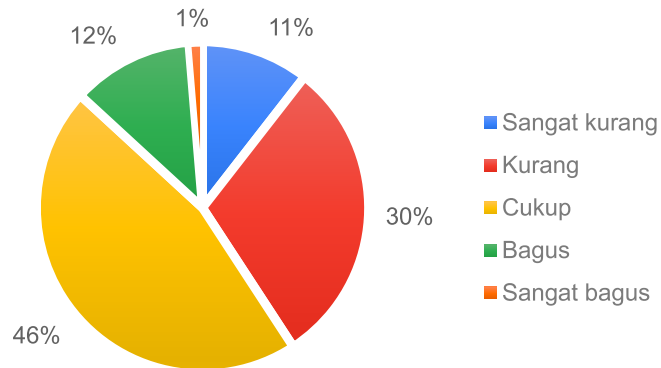


Figure 92 Pemerintah Kabupaten/Kota

Responden survei yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota menilai “Cukup” terhadap teknologi/sistem informasi manajemen risiko yang mereka gunakan (46%). Hasil ini disusul oleh jawaban “Kurang” (30%) dan “Bagus” (12%).

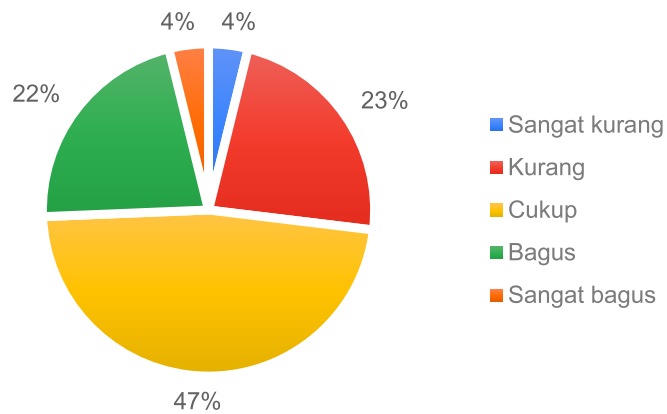


Figure 93 Organisasi sektor publik lainnya

Untuk responden survei yang berasal dari Organisasi sektor publik lainnya juga menilai “Cukup” terhadap teknologi/sistem informasi manajemen risiko yang mereka gunakan (47%). Hasil ini disusul oleh jawaban “Kurang” (23%) dan “Bagus” (22%).

Kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang dijalankan

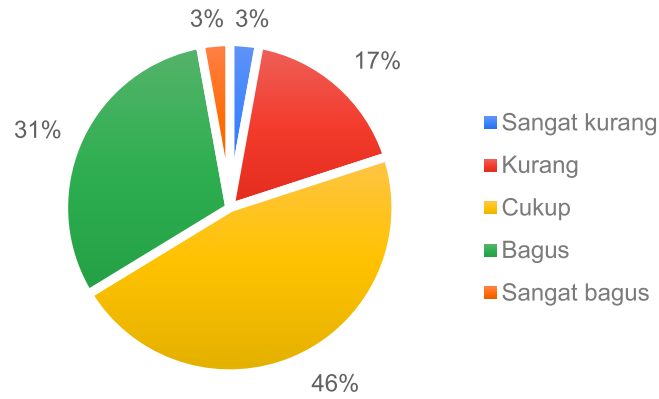


Figure 94 Semua Responden

Berkaitan dengan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang diberlakukan di lingkungan organisasi, sebagian besar responden menilai bahwa kebijakan dan prosedur tersebut telah “Cukup” memadai (46%), dengan mayoritas berikutnya menilai “Bagus” (31%).

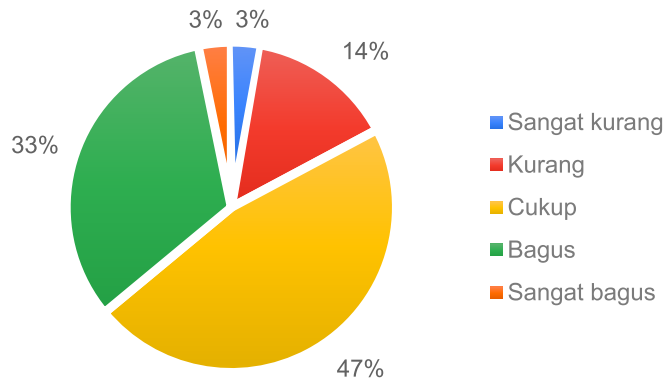


Figure 95 Kementerian/Badan/Lembaga

Untuk responden yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga menilai bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang dijalankan “Cukup” memadai (47%), dengan mayoritas berikutnya menilai “Bagus” (33%).

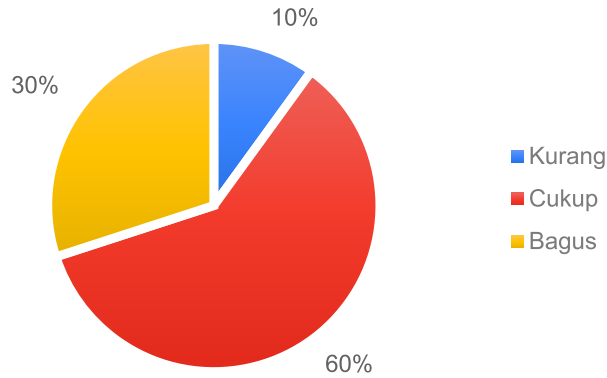


Figure 96 Pemerintah Provinsi

Responden yang berasal dari Pemerintah Provinsi menilai bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang dijalankan “Cukup” memadai (60%), dengan mayoritas berikutnya menilai “Bagus” (30%).

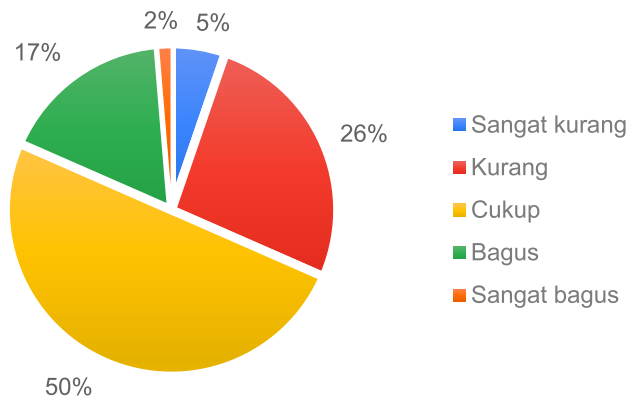


Figure 97 Pemerintah Kabupaten/Kota

Untuk responden yang berasal dari Pemerintah Provinsi menilai bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang dijalankan “Cukup” memadai (50%), dengan mayoritas berikutnya menilai “Kurang” (26%).

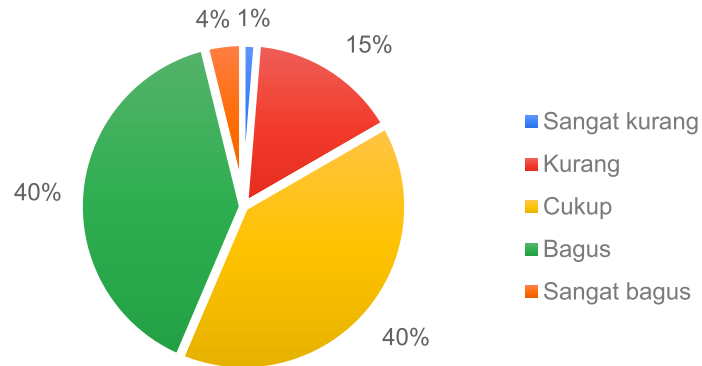


Figure 98 Organisasi sektor publik lainnya

Responden yang berasal dari Organisasi sektor public lainnya juga menilai bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang dijalankan “Cukup” memadai (40%), dengan mayoritas berikutnya menilai “Bagus” (40%).

Struktur organisasi manajemen risiko

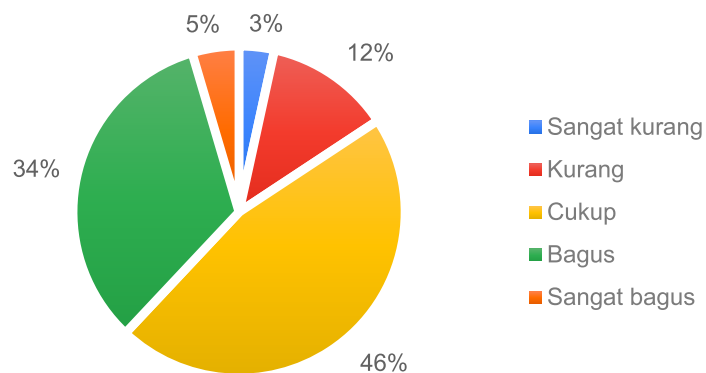


Figure 99 Semua Responden

Dari total responden menilai bahwa struktur organisasi manajemen risiko di organisasi mereka “Cukup” memadai (46%), dengan mayoritas berikutnya (34%) menilai “Bagus” walaupun masih cukup banyak yang menilai “Kurang” (12%).

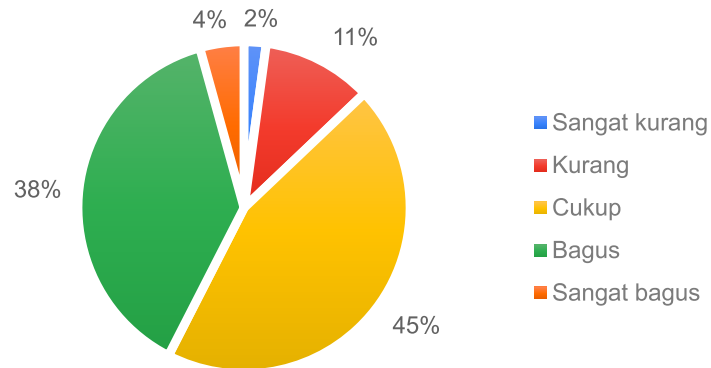


Figure 100 Kementerian/Badan/Lembaga

Responden yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga menilai bahwa struktur organisasi manajemen risiko di organisasi mereka “Cukup” memadai (45%), dengan mayoritas berikutnya (38%) menilai “Bagus” dan (11%) menilai masih “Kurang”.

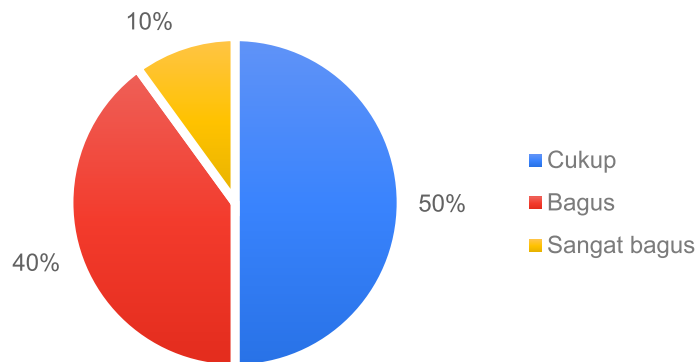


Figure 101 Pemerintah Provinsi

Untuk responden yang berasal dari Pemerintah Provinsi menilai bahwa struktur organisasi manajemen risiko di organisasi mereka “Cukup” memadai (50%), dengan mayoritas berikutnya (40%) menilai “Bagus” dan (10%) menilai “Sangat bagus”.

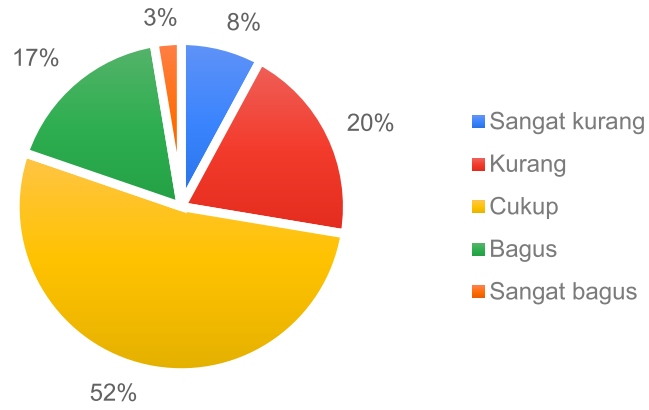


Figure 102 Pemerintah Kabupaten/Kota

Responden yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota menilai bahwa struktur organisasi manajemen risiko di organisasi mereka “Cukup” memadai (52%), dengan mayoritas berikutnya (20%) menilai masih “Kurang” dan (17%) menilai “Bagus”.

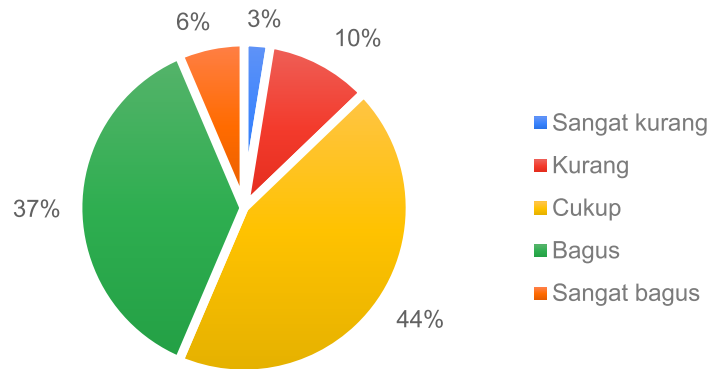


Figure 103 Organisasi sektor publik lainnya

Responden yang berasal dari Organisasi sektor publik lainnya juga menilai bahwa struktur organisasi manajemen risiko di organisasi mereka “Cukup” memadai (44%), dengan mayoritas berikutnya (37%) menilai “Bagus” dan (10%) menilai masih “Kurang”.

Tantangan Terbesar Organisasi dalam Meningkatkan Kapasitas Internal

Tantangan terbesar organisasi dalam meningkatkan kapasitas internal

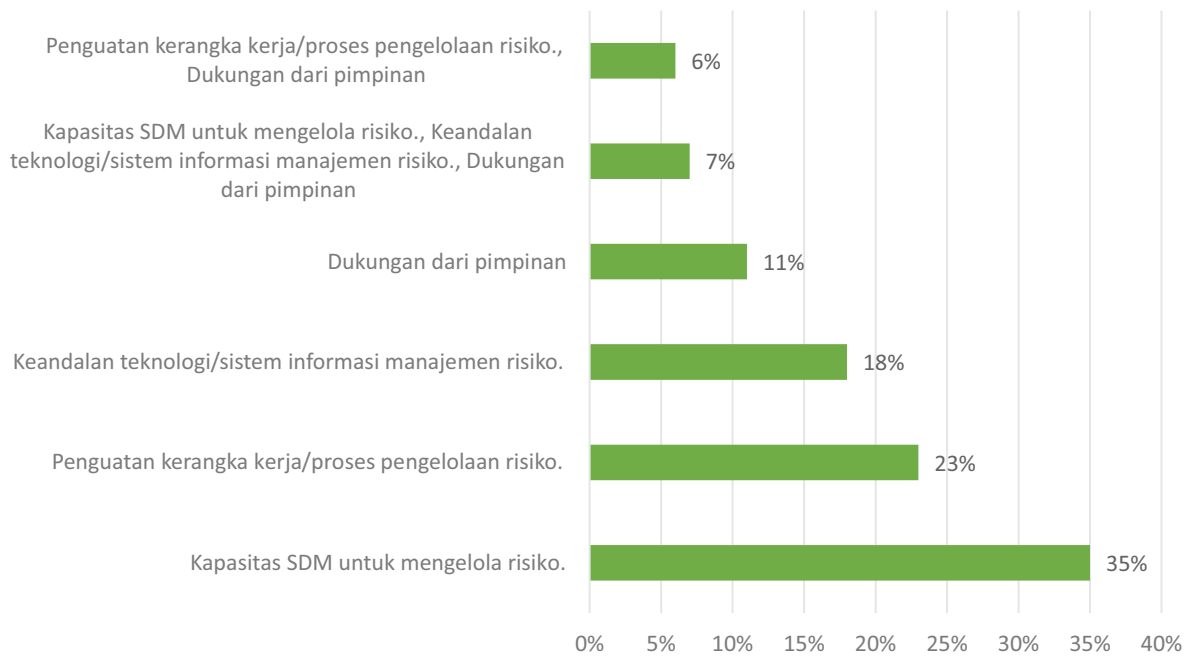


Figure 104 Semua Responden

Dalam rangka meningkatkan kapasitas internal di atas, semua responden survei menilai bahwa terdapat 1 tantangan terbesar bagi organisasi, yaitu “kapasitas SDM untuk mengelola risiko” sebesar 35%.

Tantangan terbesar organisasi dalam meningkatkan kapasitas internal

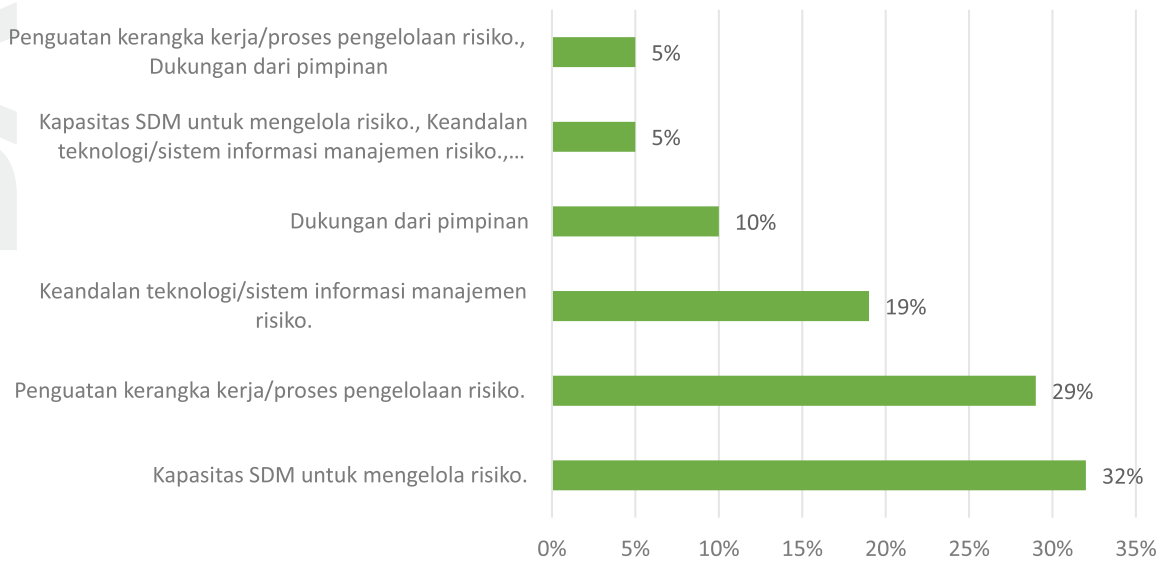


Figure 105 Kementerian/Badan/Lembaga

Untuk responden yang berasal dari Kementerian/Badan/Lembaga menyuarakan penilaian yang sama terhadap tantangan terbesar organisasi dalam meningkatkan kapasitas internal, yaitu “kapasitas SDM untuk mengelola risiko” sebesar 32%.

Tantangan terbesar organisasi dalam meningkatkan kapasitas internal

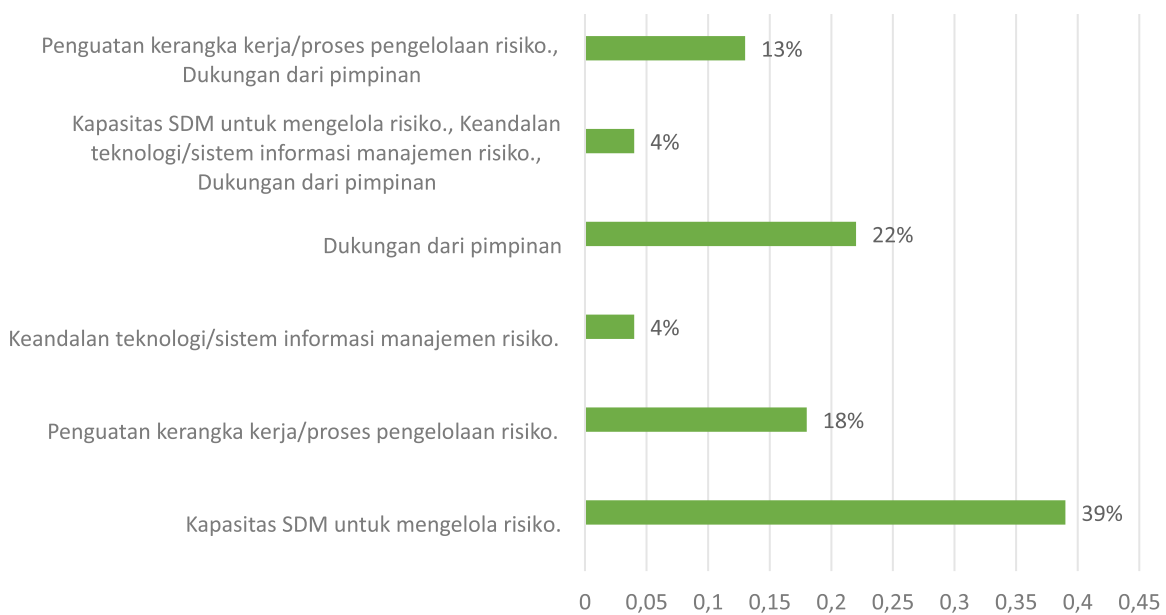


Figure 106 Pemerintah Daerah

Responden yang berasal dari Pemerintah Daerah juga menilai tantangan terbesar organisasi dalam meningkatkan kapasitas internal yang serupa, yaitu “kapasitas SDM untuk mengelola risiko” sebesar 39%

Tantangan terbesar organisasi dalam meningkatkan kapasitas internal

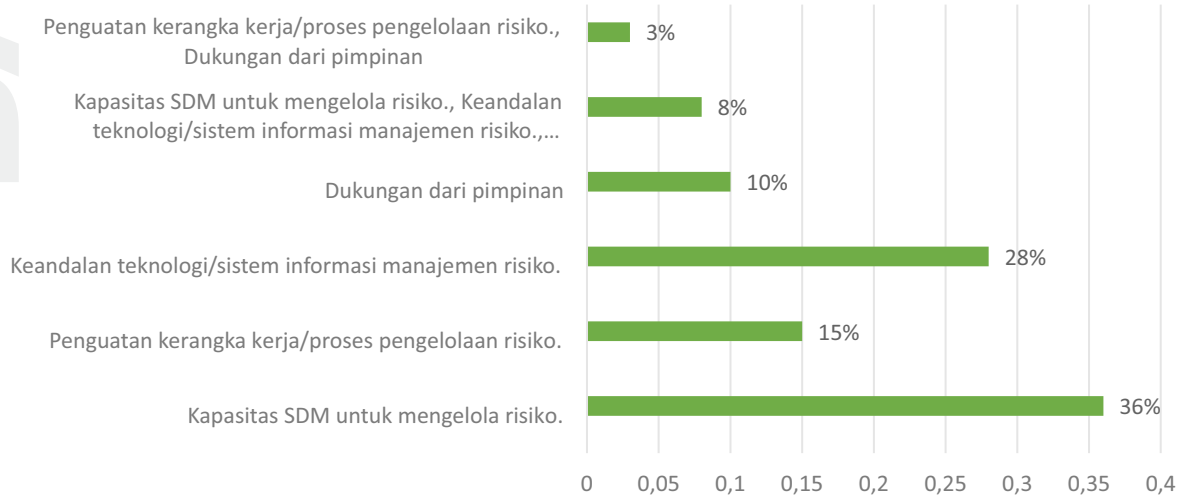


Figure 107 Organisasi sektor publik lainnya

Responden dari Organisasi sektor publik lainnya juga memiliki penilaian terhadap tantangan terbesar organisasi dalam meningkatkan kapasitas internal, yaitu “kapasitas SDM untuk mengelola risiko” sebesar 36%

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil survei yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar organisasi telah siap dalam mencapai target MRI level 3 tahun 2024 sehingga besar harapan bahwa implementasi MRPN berbasis Perpres No. 39/2023 dapat terlaksanakan dengan baik.

Meski demikian, organisasi dengan kesiapan yang **KURANG** juga masih cukup banyak sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus oleh Komite MRPN serta lembaga-lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan pembinaan MRPN, baik MRPN organisasi maupun MRPN lintas sektor. Menurut hemat kami, perlu adanya suatu program akselerasi agar capaian MRI level 3 dapat meluas dengan cepat. Hal ini mengingat bahwa (1) implementasi MRPN akan telah berlangsung di tahun 2024, (2) target MRI level 3 dalam RPJMN 2019-2024 belum mencakup pemerintah desa yang dalam implementasi MRPN juga berperan sebagai entitas MRPN, serta (3) BUMN dan BUMD yang juga nantinya berperan sebagai entitas MRPN belum pernah diukur tingkat maturitas MRI-nya dan bisa jadi belum semua mencapai level 3.



EPILOG



Mewakili tim penulis, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu responden yang telah berpartisipasi dalam survei ini. Semoga hasil survei ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai informasi pendahuluan yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh praktisi dan profesional manajemen risiko sektor publik di Indonesia.

Tim Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan Survei Manajemen Risiko Sektor Publik 2023 ini, oleh karena itu kami berkomitmen untuk melakukan berbagai pengembangan guna meningkatkan kualitas survei di masa-masa mendatang. Jika Bapak dan Ibu ingin menyampaikan saran dan masukan terkait pengembangan penyelenggaraan survei tahunan IRMAPA ini, Bapak dan Ibu dapat menyampaikannya melalui email : sekretariat@irmapa.org .

Pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili dewan pengurus IRMAPA mengimbau kepada seluruh Anggota dan para pemangku kepentingan untuk dapat lebih aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan survei-survei sejenis pada kesempatan berikutnya, termasuk juga ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif kegiatan yang diselenggarakan oleh IRMAPA. Dengan semangat saling asah, asih, dan asuh dalam komunitas manajemen risiko di Indonesia, besar harapan kita semua bahwa apa yang kita lakukan bersama dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

Akhir kata, kami berharap agar Bapak dan Ibu Anggota dan berbagai pihak dapat terus aktif berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam membangun kesiapan dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko sektor publik di Indonesia sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keberhasilan dan keefektifan implementasi MRPN berbasis Perpres No. 39/2023.

Demikian epilog ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi kita semua.
Aamiin.....

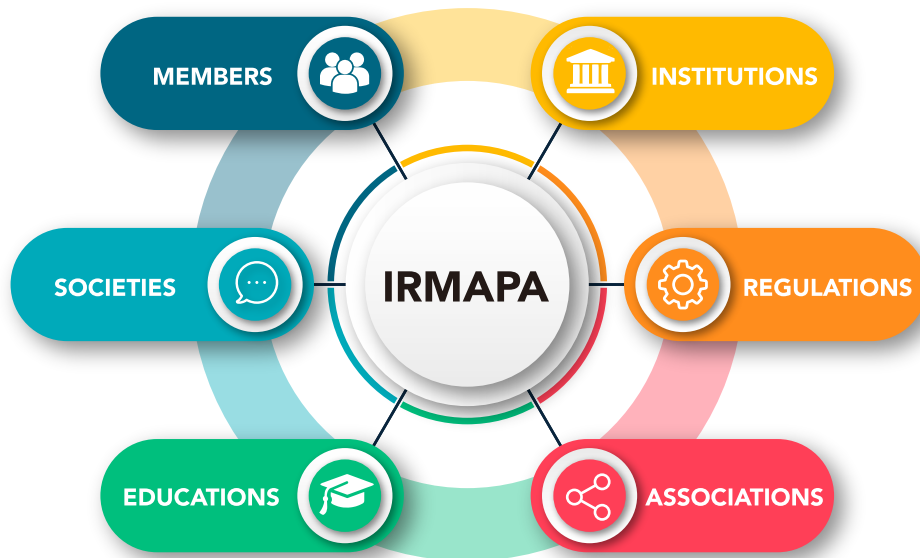
Salam IRMAPA,

R. Rachmadi Gustrian
Sekretaris Jenderal



Didirikan tahun 2012, Indonesia Risk Management Professional Association [IRMAPA] merupakan asosiasi bagi para profesional bidang manajemen risiko dari berbagai sektor dan industri di Indonesia.

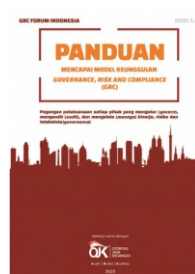
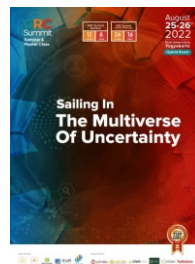
Saat ini IRMAPA melayani 10.000+/- Anggotanya yang datang dari beragam latar belakang, seperti para praktisi dari manajemen puncak hingga lini di perusahaan PMA, BUMN, perusahaan terbuka maupun tidak, pejabat pemerintah, konsultan, periset, dosen, dan mahasiswa.



Memahami peran sentral IRMAPA dalam mendukung penerapan manajemen risiko di Indonesia, IRMAPA menghubungkan para pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan dan inisiatif agar tercipta kolaborasi yang sinergis antar pemangku kepentingan di mana tiap pemangku kepentingan dapat menemukan apa yang dibutuhkan bagi manajemen risiko di tempat masing-masing melalui IRMAPA.

Dengan interaksi yang demikian, secara kolektif IRMAPA dengan para pemangku kepengingatannya memberikan kontribusi terhadap pengembangan penerapan manajemen risiko di Indonesia.

Beberapa Inisiatif & Program IRMAPA



<https://irmapa.org/>

sekretariat@irmapa.org +62 811-1291-253

[irmapa](#) [irmapa.org](#) [irmapa_org](#) [irmapa_org](#)



PUBLIC SECTOR SERVICES

The Way Academy merupakan unit usaha dibawah naungan Center for Risk Management and Sustainability (CRMS) Indonesia yang memiliki fokus utama membantu Lembaga di Sektor Publik mengembangkan kapasitas dan kapabilitas bidang Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan.

Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kebutuhan terhadap program pengembangan kapasitas dan kapabilitas bidang Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan di Sektor Publik semakin meningkat, *Program The Way Academy* antara lain:

- a. Program pelatihan bidang Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan kepada Lembaga Sektor Publik.
- b. Program persiapan sertifikasi kompetensi bidang Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan kepada Lembaga Sektor Publik.
- c. Program digitalisasi bidang Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan kepada Lembaga Sektor Publik.
- d. Program pendampingan (konsultasi) bidang Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan kepada Lembaga Sektor Publik.
- e. Dan program lainnya yang berkaitan dengan program peningkatan kapasitas dan kapabilitas bidang Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan di Lembaga Sektor Publik

Bekerjasama dengan IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association) dalam pengembangan kompetensi anggota IRMAPA, The WAY Academy menyelenggarakan aktivitas berupa pelatihan (training), seminar, lokakarya (workshop), dan aktivitas pengembangan kapasitas dalam bentuk lainnya di berbagai disiplin keilmuan, khususnya terkait dengan bidang, namun tidak terbatas pada manajemen risiko.





Melayani, Profesional, Terpercaya

@atr_bpn

 Kementerian ATK.3PN

 @kementerian.atrbpn



PELATIHAN DAN SERTIFIKASI
QRMO
Qualified Risk Management Officer
Pembinaan Manajemen Risiko Berkeadilan

25 - 26 Oktober 2023
Hotel Salak, Bogor

Dikembangkan bersama oleh:

Akreditasi LPK MKS oleh:

Disusun untuk:

Lisensi dan Akreditasi ISO 17024 LSP oleh:

MEMAHAMI DATA INTEGRITY SEBAGAI FONDASI MANAJEMEN RISIKO TERPADU

RABU, 30 MARET 2022, PUKUL 08.30-11.30

10 PSB

PEMBICARA

- Bernanda Daria Pratiwi, MSc Com, CMA, CPA, ACRA, CIA, CFA**
SPECIALIST, SENIOR SENIOR MANAGER, FINANCIAL AND RISK MANAGEMENT, BANK PERSIBERIA (PERSIBERIA GROUP)
- Dr. Agus Paruhita Agus Purnomo Wibisono**
DESAK FAKULTAS EKONOMI, MANAJEMEN DAN INFORMATIKA, UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD)
- Prof. Dr. Ing. Ir. Suhardi, M.T.**
LEKAS, DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA, UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD)

KEYNOTE

- Dr. Anindita Aljaya**
MANAJER, DEPT. STRATEGI DAN MANAJEMEN RENCANA, PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

MODERATOR

- Charles E. Syarif, M.M., CSRP, CRRP, CISO, CISO, BNSP**
LEKAS, MANAJER RENCANA MANAJEMEN RENCANA, PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

FREE SEMINAR*
*Untuk Karyawan yang ada, melalui undangan undangan

Informasi LSP LSP:
Rizki Lumban Tobing, rizki@lsp.academy.id
+62 815 8366 1827
PIS: 3487787

Website: www.lsp.academy.id
+62 815 1616 3445

PENYERAHKAN

https://bit.ly/WelkomTheRiskManer



THE WAY ACADEMY

Contact Us

**Gedung Tifa Arum Realty, Lantai 3, Ruang 305
Jl. Kuningan Barat No.26
Jakarta 12170**

Email:

sekretariat@wayacademy.id , fitri271273@gmail.com

Phone:

**0858 8266 1827 (Fitri Sawitri);
0813 8898 9969 (Sekretariat)**

Website:

<https://wayacademy.id/>

<https://www.instagram.com/wayacademyid>

Copyright @2023

